

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA
UTARA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA : RIRIN YUNI ARISKA
NPM : 1705170103
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : RIRIN YUNI ARISKA
N P M : 1705170103
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

Penguji II

(SUKMA FESMANA, S.E., M.Si)

Pembimbing

(SEPRIDA HANUM HARAHAP, S.E., S.S., M.Si)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA : RIRIN YUNI ARISKA
NPM : 1705170103
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian mempertahankan skripsi

Medan, Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

SEPRIDA HANUM HARAHAHAP, SE, SS, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

H. J. JURJI, SE., M.M., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : **RIRIN YUNI ARISKA**
NPM : 1705170103
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



RIRIN YUNI ARISKA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri Ba No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ririn Yuni Ariska
NPM : 1705170103
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Seprida Hanum Harahap, SE., SS., M.Si
Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki: -Latar belakang -Identifikasi dan rumusan masalah		
Bab 2	Tambahkan: -Teori dan Jurnal Perbaiki: -Kerangka Konseptual		
Bab 3	Perbaiki: -Defenisi operasional -Teknik analisis data		
Bab 4	Perbaiki: -Analisis data dan pembahasan Tambahkan: -Teori		
Bab 5	Perbaiki: -Kesimpulan dan saran		
Daftar Pustaka	Pastikan seluruh teori ada di daftar pustaka		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Sidang Meja Hijau	08/08/21	

Medan, Oktober 2021

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Seprida Hanum Harahap, SE., SS., M.Si)

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian skripsi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Judul dari skripsi ini adalah

”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara”

Penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan yang ada, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu dengan rasa rendah hati bersedia menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dalam perbaikan skripsi penelitian ini kedepannya. Dalam skripsi ini penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk. berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak penulis bisa menyelesaikannya. Untuk itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

1. Seluruh Keluarga besar terutama Nenek dan Adik saya tercinta, yang telah memberikan dukungan moril/material kepada penulis.

2. Kepada Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E., M.M, M.Si selaku Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh Dosen-Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Siti Aisyah Siregar, S.E, M.Ak selaku Dosen Penasihat akademik.
10. Ibu Seprida Hanum Hrp, S.E, S.S, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
11. Kepada Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Kepada Pacar penulis, Andri Handoko.
13. Kepada Sahabat-Sahabat penulis Annisa Rahmayani Manurung, Amanda Faradilla Ardhi, Syarah Aldira, Shafwani Nurin, Anggie Anita, Siti Zuleha, Diannisa Azhara, Tedi Purnomo, Maulida Matondang, Nafischa Earning Nabilah, Yollanda Alvira, Melani Febiola, Febby Sinaga & Murni

Terimakasih atas bantuan, kebersamaan, ke-keluargaan, serta waktu dan dukungannya selama ini kepada penulis, semoga ALLAH SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Medan, September 2021
Penulis

Ririn Yuni Ariska
1705170103

ABSTRAK

Ririn Yuni Ariska, NPM. 1705170103. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Skripsi. 2021

Kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan teknik dokumentasi. Sampel penelitian ini berjumlah 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan Metode Analisis Regresi Linear Berganda.

Hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, sedangkan Belanja Modal tidak Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, namun secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Batasan Masalah.....	16
1.4 Rumusan Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian	17
1.6 Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Uraian Teori	20
2.1.1 Kinerja Keuangan.....	20
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah	20
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	24
2.1.4 Dana Perimbangan	30
2.1.5 Belanja Modal	33
2.1.6 Teori Peacock dan Wiseman.....	35
2.2 Penelitian Terdahulu	37
2.3 Kerangka Konseptual	39
2.3.1 PAD Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan	39
2.3.2 Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan	40

2.3.3 Belanja Modal Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan	41
2.3.4 PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	42
2.4 Hipotesis.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Defenisi Operasional.....	46
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	48
3.3.1 Tempat.....	48
3.3.2 Waktu Penelitian	48
3.4 Teknik Pengumpulan Populasi dan Sampel.....	49
3.4.1 Populasi	49
3.4.2 Sampel.....	50
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5 Teknik Analisis Data.....	53
3.5.1 Uji Asumsi Klasik	53
a) Uji Normalitas.....	53
b) Uji Heteroskedastisitas	54
c) Uji Multikoleniaritas	54
d) Uji Autokorelasi.....	55
3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	55
3.6.3 Uji Hipotesis.....	56
3.6.4 Uji Koefisien Determinasi.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	59
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	59

4.1.1 Sejarah.....	59
4.1.2 Visi	60
4.1.3 Misi	61
4.1.4 Struktur Organisasi.....	61
4.2 Analisis Data	66
4.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	66
a) Uji Normalitas.....	67
b) Uji Heteroskedasitas	68
c) Uji Multikolinearitas	69
d) Uji Autokorelasi.....	69
4.2.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	70
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis	72
a) Uji t	72
b) Uji F.....	73
4.2.5 Uji Koefisien Determinasi.....	74
4.3 Pembahasan.....	75
4.3.1 Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan	75
4.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan	76
4.3.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan	78
4.3.4 Pengaruh PAD, Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	80
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran.....	83
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara	4
Tabel 1.2 <i>Research</i> GAP	14
Tabel 2.1 Kriteria Tolak Ukur Rasio Kemandirian	23
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1 Variabel Operasional.....	46
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	48
Tabel 3.3 Populasi Penelitian	49
Tabel 3.4 Sampel Penelitian.....	51
Tabel 3.5 Kriteria Penarikan Populasi dan Sampel Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	52
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	67
Tabel 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	68
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi.....	70
Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	71
Tabel 4.5 Hasil Uji t	72
Tabel 4.6 Hasil Uji F	74
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fenomena Masalah Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara	3
Gambar 2.1 Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan	40
Gamba 2.2 Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan	41
Gamba 2.3 Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan	42
Gamba 2.4 PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	44
Gamba 3.1 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t	57
Gamba 3.2 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F	58
Gamba 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pada dasarnya terkandung tiga misi utama yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Mardiasmo, 2019). Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Di Indonesia, anggaran daerah disebut dengan APBD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD. Komponen APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah, serta pembiayaan anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran Pemerintah Daerah. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan efektif (Kawedar, 2013).

Dalam kondisi saat ini dimana kinerja pemerintahan masih kurang baik mulai dari daerah sampai ke pusat. Ini dapat diketahui dari efektifitas dan efisiensi kebijakan pengeluaran pemerintah yang belum dapat sesuai dengan target yang ditentukan. Selain itu juga masih banyaknya oknum pemerintah yang melakukan

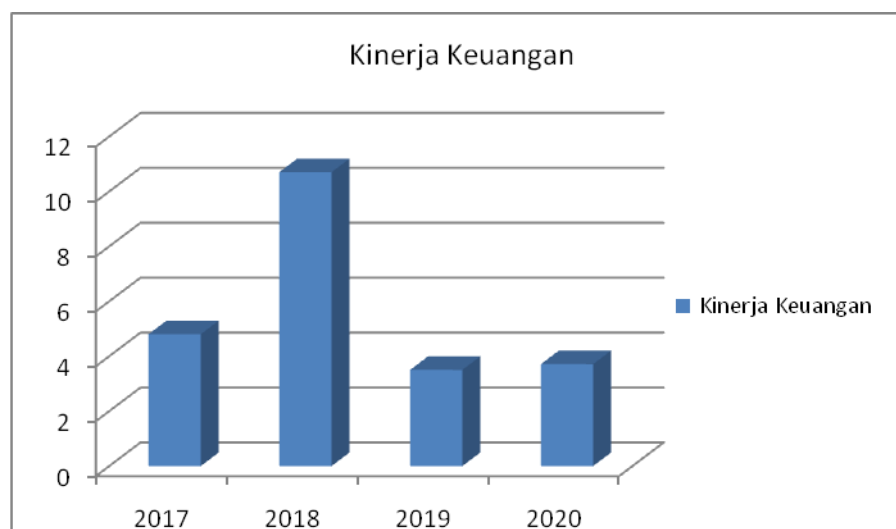
korupsi, atas dana pemerintah. Hakikatnya APBD adalah penjabaran kuantitatif dari tujuan, sasaran pemerintah daerah dan tugas pokok serta fungsi unit kerja, sehingga harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu (Saragih, 2020). Oleh sebab itu alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005).

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap pemerintah daerah yang salah satunya adalah infrastruktur di daerah. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 71, 2010). Pada dasarnya belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Padahal pemanfaatan belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan (Saragih, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah

telah mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang telah direncanakan (Khairunnisa, 2018).

Menurut (Pilat, J. J., & Morasa, 2017) “Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.” Sedangkan menurut (Ardila, 2015) “Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik”.



Gambar 1.1
Fenomena Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara

Di Sumatera Utara sendiri, fenomena mengenai kinerja keuangan masih mencerminkan bahwa persentase rasio kemandirian yang masih sangat rendah terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga

menyebabkan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara bergantung dengan pemerintah pusat. Grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hingga 2018 kinerja keuangan rasio kemandirian meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2019 hingga 2020 kinerja keuangan di Sumatera Utara memiliki rasio kemandirian yang kurang stabil dikarenakan pada tahun 2019 hingga 2020 di Indonesia khususnya di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan ekonomi yang disebabkan oleh adanya virus Covid-19.

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD dengan mengoptimalkan potensi, kreatifitas, dan kemampuan daerah tersebut. Tujuannya adalah agar pemerintah mampu membiayai usaha-usaha dan pembangunan daerah secara mandiri sehingga tidak menggantungkan diri pada pemerintah pusat.

Adapun Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 s/d 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Kab/ Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal	KK
1.	Kab. Asahan	2017	12.368.730.487.859	1.364.133.720.884.400	35.014.602.821.980	0,09
		2018	14.952.048.711.329	11.766.214.574.870	230.200.116.402	1,27
		2019	149.647.030.441	1.198.101.351.385	304.478.575.304	0,13
		2020	15.930.833.349.194	107.118.560.667.100	14.698.302.306.525	0,15

2.	Kab. Dairi	2017	12.848.975.133.188	790.001.619.650	26.070.596.896.400	16,26
		2018	7.390.682.960.345	951.857.095.064	201.561.437.852	7,76
		2019	74.360.339.717	826.507.837.823	197.567.865.963	0,09
		2020	8.975.899.787.384	855.999.183.000	13.959.877.798.880	10,49
3.	Kab. Deli Serdang	2017	84.928.615.115.113	1.987.560.013.808	74.145.689.703.263	42,73
		2018	72.964.859.448.868	1.992.298.798.336	670.584.193.040	36,62
		2019	1.167.794.977.442	2.000.833.953.988	703.280.070.640	0,58
		2020	80.971.982.926.842	183.729.462.298.800	48.030.532.565.190	0,44
4.	Kab. Tanah Karo	2017	15.786.672.097.613	832.636.278.000	33.953.524.097.711	18,96
		2018	1.319.020.016.711	970.993.634.321	804.270.116.711	1,36
		2019	1.773.705.129	1.531.356.154	757.048.872	1,16
		2020	1.379.102.962	1.379.111.962	685.819.658	1,00
5.	Kab. Labuhan Batu	2017	12.467.401.737.534	908.583.176.239	27.792.102.065.300	13,72
		2018	16.279.447.201.674	908.583.176.239	139.178.414.287	17,92
		2019	175.335.685.316	935.148.005.724	238.729.009.917	0,19
		2020	16.148.660.911.915	80.335.912.740.100	13.662.134.387.900	0,20
6.	Kab. Langkat	2017	13.971.764.785.509	1.868.902.371.908	52.716.870.172.216	7,48
		2018	1.834.309.558.986	1.832.309.558.986	1.340.032.943.000	1,00
		2019	2.491.123.054	2.226.184.130	1.212.698.537	1,12
		2020	1.941.036.354	1.941.036.354	1.086.116.531	1,00
7.	Kab. Mandailing Natal	2017	8.058.168.893.702	1.086.204.333.000	26.824.339.753.800	7,82
		2018	8.480.992.349.646	1.071.095.267.000	199.849.014.896	7,92
		2019	98.758.815.327	979.280.101	206.392.843.127	10,84
		2020	9.045.477.718.454	741.093.645.	13.815.220.087.464	12,58
8.	Kab. Nias	2017	9.572.616.774.420	59.949.352.008.400	23.952.386.063.100	0,16
		2018	8.875.460.611.477	611.725.678.757	207.016.876.762	14,91
		2019	107.632.139.179	621.468.917.081	190.454.026.585	0,17
		2020	10.375.539.288.174	54.790.503.401.400	14.534.576.861.640	0,19
9.	Kab. Simalun	2017	25.266.301.552.868	165.191.353.446.700	29.371.345.061.800	0,15
		2018	3.156.679.451.580	2.816.179.451.580	1.688.946.321.000	1,12

	gun	2019	2.442.089.255	2.347.472.353	1.243.341.478	1,04
		2020	2.426.599.490	2.426.599.589	1.126.357.674	1,00
10.	Kab. Tapanuli Selatan	2017	11.744.894.750.400	83.302.784.892.400	27.723.185.274.100	0,14
		2018	1.259.997.958.244	1.243.242.590.237	920.379.409.000	1,01
		2019	1.588.288.029	1.482.795.842	659.619.123	1,07
		2020	1.565.235.574	1.565.235.575	591.887.671	1,00
11.	Kab. Tapanuli Tengah	2017	7.271.030.859.053	832.636.278.000	16.752.131.440.309	8,73
		2018	7.666.088.341.033	905.749.933.000	220.747.371.092	8,46
		2019	88.441.123.323	863.854.168.332	219.450.399.719	0,10
		2020	8.746.931.763.221	84.479.694.535.100	24.431.643.935.800	0,10
12.	Kab. Tapanuli Utara	2017	15.806.727.985.800	82.836.161.595.900	15.584.495.391.011	0,19
		2018	11.516.030.220.100	868.012.988.517	181.662.031.563	13,27
		2019	123.753.915.831	898.881.627.467	194.947.102.674	0,14
		2020	13.337.509.496.544	80.957.022.480.700	33.915.997.933.936	0,16
13.	Kab. Toba Samosir	2017	5.484.082.364.603	798.493.519.928	19.923.003.116.025	6,87
		2018	5.229.896.580.340	716.254.774.000	152.970.216.966	7,30
		2019	68.046.526.605	735.587.572.963	135.339.350.834	0,09
		2020	5.740.316.293.328	65.935.863.265.300	6.658.319.921.700	0,09
14.	Kota Binjai	2017	13.921.762.169.748	719.167.216.158	15.405.996.229.396	19,36
		2018	13.587.092.063.289	725.647.284.000	214.254.227.112	18,72
		2019	108.954.525.370	722.172.307.255	127.213.320.411	0,15
		2020	11.227.358.610.162	66.581.131.600.000	10.221.580.925.911	0,17
15.	Kota Medan	2017	173.975.692.263.350	212.276.941.979.679.300	99.747.599.190.200	0,82
		2018	163.620.451.468.353	2.157.180.424.946	735.996.886.210	75,85
		2019	1.829.665.882.248	2.156.807.334.247	992.661.245.694	0,85
		2020	150.948.358.816.701	205.622.307.397.800	30.827.827.805.733	0,73
16.	Kota Pematangsiantar	2017	10.544.599.320.423	76.454.744.576.200	26.283.598.678.400	0,14
		2018	997.384.585.394	977.912.719.161	808.465.215.000	1,02
		2019	1.070.253.953.475	948.523.364	597.491.807	1,13
		2020	1.052.660.950	1.052.660.950	546.406.258	1,00

17.	Kota Sibolga	2017	10.367.220.393.817	49.049.963.981.800	12.482.437.493.652	0,21
		2018	8.124.573.381.160	512.639.624.901	142.467.823.362	15,85
		2019	69.312.217.832	502.391.227.055	81.569.259.139	0,14
		2020	7.953.931.641.203	46.420.815.400.800	8.604.123.737.600	0,17
18.	Kota Tanjung Balai	2017	6.510.826.661.552	53.980.490.006.000	12.495.057.956.400	0,12
		2018	831.473.050.228	625.773.050.228	530.190.296.000	1,33
		2019	656.100.953	648.523.364	597.491.807	1,13
		2020	744.302.284	745.464.770	398.745.108	1,00
19.	Kota Tebing Tinggi	2017	1.132.287.468.717	56.691.782.968.400	18.415.616.247.800	0,02
		2018	790.416.665.396	704.172.428.178	547.815.047.000	1,12
		2019	744.910.136	419.071.661	712.955.521	1,78
		2020	600.925.434	656.652.861	380.088.729	0,92
20.	Kota Padang Sidempu an	2017	10.964.041.928.055	67.318.939.711.800	18.409.396.756.676	6,62
		2018	7.506.357.509.273	641.432.737.569	184.093.967.563	11,70
		2019	87.432.283.185	693.704.664.731	856.448.347	0,13
		2020	6.400.414.263.459	60.384.664.595.600	6.637.904.947.614	0,11
21.	Kab. Pakpak Bharat	2017	2.932.048.744.676	442.967.749.000	13.836.342.736.676	6,62
		2018	2.006.120.792.274	431.431.968.000	118.336.626.935	4,65
		2019	33.515.937.645	462.549.741.238	145.937.021.774	0,07
		2020	2.169.079.928.298	39.512.004.534.200	6.370.228.729.500	0,05
22.	Kab. Nias Selatan	2017	1.845.026.670.007	768.617.877.771	22.232.843.792.400	2,40
		2018	1.960.573.478.242	771.694.298.994	221.305.834.645	2,54
		2019	25.664.883.761	859.504.478.763	238.978.343.319	0,03
		2020	1.659.889.414.570	96.846.432.032.000	29.343.451.312.526	0,02
23.	Kab. Humban g Hasund utan	2017	8.559.835.702.701	71.993.323.187.600	22.470.295.370.700	0,12
		2018	9.273.585.381.293	681.797.476.833	168.860.963.829	13,60
		2019	73.757.931.630	707.685.265.766	177.278.522.408	0,10
		2020	6.793.769.474.672	64.988.803.158.300	11.846.493.559.900	0,10
24.	Kab. Serdang	2017	10.731.129.022.863	102.414.817.038.300	23.860.491.131.100	0,10
		2018	16.438.297.221.304	1.128.928.302.000	349.104.338.217	17,22

	Bedagai	2019	1.647.549.345	1.577.040.180	797.088.981	1,05
		2020	1.603.911.841	1.665.849.841	722.092.473	0,96
25.	Kab. Samosir	2017	4.744.662.338.936	615.308.732.000	186.281.849.902	7,71
		2018	4.744.662.338.936	615.308.732.000	186.281.849.902	7,71
		2019	60.497.449.963	636.204.549.291	164.093.834.379	0,10
		2020	6.037.380.662.991	54.554.098.893.300	10.796.658.063.827	0,11
26.	Kab. Batubara	2017	6.694.479.637.652	78.199.782.428.000	16.442.000.264.600	0,09
		2018	6.322.591.617.300	784.874.225.863	139.977.493.680	8,06
		2019	1.335.269.414	1.208.154.445	625.198.759	1,11
		2020	1.257.910.799	1.356.120.136	559.938.068	0,93
27.	Kab. Padang Lawas	2017	52.299.754.095	715.103.544.000	247.447.823.079	0,07
		2018	5.652.905.975.000	961.343.088.579	221.963.650.130	5,88
		2019	13.475.924.959	743.812.943.726	204.458.003.516	0,02
		2020	4.405.562.127.444	72.202.863.417.100	14.336.654.180.800	0,06
28.	Kab. Padang Lawas Utara	2017	7.452.491.969.280	70.933.308.017.600	31.257.117.220.000	0,11
		2018	7.430.609.749.989	700.703.635.068	196.036.175.259	10,60
		2019	42.929.111.657	763.032.737.308	247.484.629.027	0,06
		2020	5.196.961.958.800	69.557.253.549.600	15.215.518.088.300	0,07
29.	Kab. Labuhan Batu Selatan	2017	41.169.542.000	741.734.194.000	227.492.997.052	0,06
		2018	930.600.477.992	889.737.191.660	719.576.678.000	1,05
		2019	1.025.077.259	950.982.910	522.537.176	1,08
		2020	1.048.005.583	1.048.005.583	479.053.624	1,00
30.	Kab. Labuhan Batu Utara	2017	43.182.972.000	707.636.391.000	74.592.574.628	0,06
		2018	5.701.069.054.581	8.642.562.014.242	223.037.632.087	6,60
		2019	70.122.562.532	817.231.451.960	258.116.878.081	0,09
		2020	5.549.409.570.223	71.952.716.992.900	10.341.624.303.659	0,08
31.	Kab. Nias Utara	2017	7.517.385.818.570	55.570.664.734.600	25.167.586.917.500	0,14
		2018	14.068.379.741.907	564.777.933.815	195.095.726.869	24,91
		2019	57.961.363.629	659.120.965.964	258.215.519.657	0,09
		2020	5.887.896.997.409	55.900.474.498.900	17.799.276.057.578	0,11

32.	Kab. Nias Barat	2017	36.239.996.548	506.809.585.092	199.747.992.746	0,07
		2018	739.404.521.465	709.049.265.465	576.283.975.000	1,04
		2019	772.659.821	710.942.947	359.696.080	1,09
		2020	857.534.77	857.532.770	332.435.947	1,00
33.	Kota Gunung Sitoli	2017	3.652.570.620.000	54.684.808.257.400	24.961.759.885.250	0,07
		2018	3.406.628.577.760	552.039.778.301	183.521.284.315	6,17
		2019	35.209.121.388	559.094.823.827	156.757.286.042	0,06
		2020	2.553.025.295.337	52.918.658.877.900	14.587.761.473.600	0,05

Sumber: <http://bpkad.sumutprov.go.id/>

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan dari tahun ketahun tidak stabil cenderung menurun. Hal ini berarti Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara masih kurang mampu untuk mengelolala Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara bergantung dengan pemerintah pusat.

Hal ini dapat diperjelas dengan beberapa uraian data pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Pada Kabupaten Deli Serdang, dimana pada tahun 2017 kinerja keuangannya sebesar 42,73%, namun pada tahun 2018, 2019 dan 2020 kinerja keuangannya mengalami penurunan sebesar 36,32%, 0,58% dan 0,44%. Pada Kabupaten Tapanuli Tengah, kinerja keuangan pada tahun 2017 sebesar 8,73% namun mengalami penurunan pada kinerja tahun 2018, 2019 dan 2020, yaitu sebesar 8,46% dan 0,10%. Pada Kabupaten Tapanuli Utara kinerja keuangannya mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 kinerja keuangannya meningkat sebesar 13,27% dari tahun 2017 sebesar 0,19%, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,14% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,16% walaupun peningkatannya tidak sebesar tahun 2017. Pada Kabupaten Toba Samosir kinerja

keuangannya juga mengalami fukuasi, dimana pada tahun 2017 sebesar 6,87% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 7,30% namun pada tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 0,09%. Pada Kabupaten Samosir kinerja keuangannya mengalami fluktuasi, terlihat pada tahun 2017 sebesar 8,01%, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 7,71% dan 0,10% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,11% walaupun tidak sebesar kinerja keuangan pada tahun 2017. Pada Kabupaten Labuhan Batu kinerja keuangannya juga mengalami fluktuasi, dapat terlihat pada tahun 2017 sebesar 13,72%, pada tahun 2018 kinerja keuangannya mengalami peningkatan sebesar 17,92%, namun pada tahun 2019 kinerja keuangannya mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 0,19% dan pada tahun 2020 kinerja keuangannya kembali mengalami peningkatan sebesar 0,20% walaupun tidak sebesar kinerja keuangan pada tahun 2017 dan 2018. Pada Kota Medan kinerja keuangan pada tahun 2017 sebesar 0,82% namun pada tahun 2018 kinerja keuangannya mengalami peningkatan yaitu sebesar 75,85% dan pada tahun 2019 dan 2020 kinerjanya kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 0,85% dan 0,73%. Kinerja keuangan pada Kota Binjai juga mengalami fluktuasi, dimana kinerja keuangan pada tahun 2017 sebesar 19,36% namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 18,72% dan 0,15% tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,17% walaupun tidak sebesar pada tahun 2017 dan 2018. Kinerja keuangan kota Sibolga juga mengalami fluktuasi, terlihat pada tahun 2017 0,21% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 15,85%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,14% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar

0,17% walaupun tidak sebesar pada tahun 2017 dan 2018. Kota Sibolga kinerja keuangannya pada tahun 2017 sebesar 0,07% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 6,17% lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 0,06% dan 0,05%.

Berdasarkan Uraian diatas, maka adanya penelitian terdahulu yang juga dilakukan peneliti lainnya seperti yang dilakukan (Sari & Mustanda, 2019) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset yang dimiliki pemerintah daerah belum memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Badung periode 2013 – 2017. Begitu pula hasil penelitian (Lathifa, I., & Hasna, 2019) yang mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah hal yang sejalan dengan penelitian (Sari & Mustanda, 2019).

Namun dalam penelitian (Mulia, 2016), menunjukkan bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh.

Selain PAD, salah satu sumber yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana didaerah adalah dengan menggunakan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Mamuka, V., & Elim, 2014). Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisienan fiskal (Santoso, I., & Suparta, 2015).

Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selain itu, Pemerintah Pusat juga memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan pengalihan dana, sarana dan SDM. Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu DAK. Sedangkan DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Beberapa penelitian terdahulu yang membuktikan adanya pengaruh secara signifikan antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan adalah penelitian Ade dkk, (2016), terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah. (Budianto, B., & Alexander, 2016), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah yang berarti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengakibatkan kenaikan Dana Perimbangan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut (Mulia, 2016), menunjukkan bahwa Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Serta penelitian (Nuwun, 2020), menunjukkan bahwa DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh pada kinerja keuangan daerah, sedangkan secara simultan PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian yang lain

menunjukkan bahwa secara parsial hanya ada dua variabel PAD dan DAU yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu secara simultan variabel PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah daerah maka dapat diketahui bahwa pengaruh dari PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang konsisten. Berikut untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Research GAP

Penelitian Terdahulu	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
(Budianto, B ., & Alexander, 2016)	Pendapatan Asli Daerah	Kinerja Keuangan	Berpengaruh Signifikan
Ade Riyan Nastiti (2020)			Tidak Berpengaruh
Nuwun Priyono (2020)	Belanja Modal		Tidak Berpegaruh
(Mulia, 2016)			Berpengaruh Signifikan
(Budianto, B ., & Alexander, 2016)	Dana Perimbangan		Berpengaruh Signifikan

Sumber: *Review* Penelitian Terdahulu

Berdasarkan *review* dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat celah (*gap*) dalam hasil tersebut. Yaitu dimana hasil penelitian belum menunjukkan hasil yang konsisten. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh variabel PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan latarbelakang yang telah peneliti jelaskan, maka dapatkah PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Untuk memperoleh bukti empiris dari pertanyaan tersebut maka penelitian ini berjudul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara"** menjadi menarik untuk dilakukan serta peneliti memilih Provinsi Sumatera Utara sebagai objek dari pada judul tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Kurangnya Sumber Daya Keuangan jika dibandingkandengan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal pada pemerintah daerah secara nasional pada provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sudah seharusnya lebih memprioritaskan Sumber Dayanya agar pembangunan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana di daerah dapat segera tercapai serta pada laporan keuangan dapat bersifat transparan.
2. Tingkat Ketergantungan yang ditunjukkan dengan persentase Dana Perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat masih tinggi.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara belum dapat mencapai 30 persen persentase Belanja Modal sesuai dengan peraturan Pemendagri.
4. Adanya keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas dalam pemahaman keuangan daerah pada pemerintah daerah.
5. Diperlukannya pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah atas pencapaian dari pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu sebagai evaluasi berkala dan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk menjaga agar masalah yang diteliti tidak lepas dari pokok permasalahan yang ditentukan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian hanya membahas tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Rumuan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?

4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan bertujuan :

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
4. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

1.6 Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut, sehingga didapat manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan peneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapula manfaat penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, sehingga menjadi referensi yang dapat menjelaskan hubungan antara 10 faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan seperti ukuran PAD, dana perimbangan, dan belanja modal. Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dan landasan bagi pihak pemerintah daerah untuk menentukan efisiensi dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat menjadi bahasan referensi atau acuan untuk mengembangkan penelitian di masa yang akan datang atau periode selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan kontribusi dalam memahami efisiensi kinerja keuangan sebagai salah satu faktor ukuran bagi pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai hubungan Pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan teori

untuk melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dalam daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Kinerja

Dalam mencapai tujuan organisasi diperlukannya suatu strategi. Menurut Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang telah direncanakan (Khairunnisa, 2018)

Strategi organisasi biasanya dijabarkan dalam suatu program dan kegiatan sehingga organisasi tersebut akan lebih mudah dalam mencapai tujuannya. Menurut Mangkunegara (2009) Kinerja adalah suatu capaian hasil kerja, baik dari segi kualitasnya maupun kuantitas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya (Budiadi, 2018)

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi daerah yang dinilai

dengan aspek keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tersebut (Sari, I. P. & Agusti, 2016).

Kinerja merupakan suatu pencapaian yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya buruk. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya (Saragih, 2020).

Menurut (Wibowo, 2014) menjelaskan bahwa pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Dalam melakukan menganalisis kinerja keuangan hendaknya seorang mengetahui terlebih dahulu kondisi keuangan, karena semakin baik tingkat kinerja keuangan perusahaan maka akan besar juga uang yang akan diterima. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan harus ada alat ukur yang digunakan untuk mengukurnya kinerja dan harga saham dimasa yang akan datang, alat ukur yang paling sering digunakan oleh investor dan perusahaan adalah analisis rasio keuangan, yakni analisis rasio dan rasio yang paling populer digunakan adalah rasio profitabilitas (Hanum, 2009).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2014). Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2014)

Terdapat beberapa jenis pengukuran rasio kinerja keuangan pemerintah daerah:

- a. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.

Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi, maka proksi pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk kabupaten dan kota digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur dengan rasio output dengan input (Mardiasmo, 2019).

$$\text{Efisiensi KKPD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

- b. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah (Halim, 2014).

$$\text{Kemandirian KKPD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1

Kriteria Tolak Ukur Rasio Kemandirian

Kemandirian	Kemampuan Keuangan
0%-25%	Rendah Sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75-100%	Tinggi

Sumber: (Halim, 2014)

- c. Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

- d. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2014).

$$\text{Efektivitas KKPD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang pendapatan daerah dalam hak pemerintah daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan seluruh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku (Halim, 2014).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih dalam setahun

anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pemahaman pendapatan yang lebih jelas, beberapa definisi pendapatan daerah telah dikemukakan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 2 pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mendefinisikan bahwa pendapatan sebagai semua penerimaan rekening Kas Umum Negara dan Daerah yang menambah ekuitas dan lancar pada periode tahun anggaran yang bersangkutan hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang membahas tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang membahas tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Budianto, B., & Alexander, 2016).

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Tingkat belanja modal (pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang dibangun (Saragih, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan daerah

adalah hak Pemerintah Daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
- d. Lain-lain Pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Sumber pertama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah, sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel

Pajak hotel, yang biasanya dikenakan atas pelayanannya. Pelayanan yang dimaksud di sini, termasuk segala jenis jasa dan fasilitas di dalam harga atau rate hotel.

b. Pajak Restaurant dan Rumah Makan

Pajak dari restaurant dan rumah makan ini biasanya berasal dari pelayanannya. Sedangkan untuk pajak yang biasanya dikenakan ketika kita membeli makanan, dinamakan pajak pertambahan nilai atau dikenal dengan nama PPN.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan dan biasanya dikenakan untuk proses penyelenggaraannya. Hiburan di sini misalnya semua jenis pertunjukkan yang dapat ditonton

d. Pajak Reklame

Pajak yang dikenakan untuk penyelenggaraan reklame atau papan iklan.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak tersebut dikenakan atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan penerangan jalan tersebut, dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

f. Pajak Bahan Galian Golongan C

Bahan galian golongan c yang dimaksud dalam perundang-undangan misalnya adalah asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, gips, pasir, fosfat, hingga tanah liat.

g. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pemukiman

Pajak untuk pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman. Pajak akan dikenakan kepada mereka yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah maupun pemukiman, untuk keperluannya, di luar kepentingan rumah tangga dan pertanian rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Terdapat beberapa kelompok retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah, sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ini dapat dinikmati oleh pribadi atau badan, berperan sebagai retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut konsep komersial. Hal ini disebabkan sektor swasta pun bisa menyediakannya.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dijelaskan sebagai pungutan daerah untuk pembayarannya atas pemberian izin tertentu. Biasanya khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut, yang antara lain:

- a. Bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah
 - b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Terdapat beberapa jenis pengukuran Pendapatan Asli Daerah:

- a. Diukur besarnya proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari total pendapatan daerah tahun sebelumnya (t-1) karena kinerja keuangan terkait dengan periode masa lalu.

$$\text{PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD } t-1}{\text{Total Pendapatan Daerah } t-1} \times 100\%$$

- b. Diukur menggunakan realisasi pendapatan asli daerah yang disederhanakan dari nilai satuan mata uang menjadi nilai satuan persentase dengan diprosikan menggunakan logaritma. Penggunaan logaritma ditujukan untuk mengurangi adanya fluktuasi data yang berlebih.

$$\text{PAD} = \text{Ln Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}$$

2.1.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, (Budianto, B., & Alexander, 2016).

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui APBN yang bersifat kiriman dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Upaya peningkatan penerimaan daerah menjadi salah satu hal yang paling mendasar dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain

Pendapatan asli daerah (PAD), maka peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan dana perimbangan yang diterima daerah. Peningkatan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan didapat dari dana bagian daerah (*revenue sharing*) atau yang lebih dikenal dengan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tentu saja peningkatan dana perimbangan daerah yang berasal dari dana perimbangan ini hanya dimungkinkan, jika dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipenuhi serta pengeluaran-pengeluaran yang selama ini masih dilakukan secara signifikan oleh instansi pusat juga didesentralisasikan.

Pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil (pajak/bukan pajak)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan meliputi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat block grant, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Penjabaran tentang Dana Alokasi Umum (DAU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka pada hakikatnya disadari bahwa kemampuan keuangan setiap daerah dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama satu dengan yang lainnya. Di satu pihak beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial. Di lain pihak, banyak daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang jauh dari memadai, yang mengakibatkan daerah-daerah tersebut mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya. Oleh karena itu, di perlukan kebijakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), (Halim, 2014).

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang-bidangnya digunakan untuk mendanai kegiatan fisik seperti penyediaan sarana gedung sekolah, pembangunan puskesmas, dan

percepatan pembangunan, infrastruktur lainnya sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkualitas. Sementara program-program non-fisik yang dialokasikan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik yang digunakan untuk mendanai kegiatan non-fisik seperti belanja operasional pendidikan dan kesehatan, keluarga berencana, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan lain-lain sebagainya, (Halim, 2014). Terdapat beberapa jenis pengukuran dana perimbangan:

- a. Diukur besarnya proporsi realisasi dana perimbangan dari total pendapatan daerah tahun sebelumnya (t-1) karena kinerja keuangan terkait dengan periode masa lalu.

$$\text{Dana Perimbangan} = \frac{\text{Realisasi Dana Perimbangan } t-1}{\text{Total Pendapatan daerah } t-1} \times 100\%$$

- b. Diukur menggunakan realisasi dana perimbangan yang disederhanakan dari nilai satuan mata uang menjadi nilai satuan persentase dengan diprosikan menggunakan logaritma. Penggunaan logaritma ditujukan untuk mengurangi adanya fluktuasi data yang berlebih.

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Ln Total Realisasi Dana Perimbangan}$$

2.1.5 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Namun pada kenyataannya realisasi belanja modal pada akhir tahun sering kali tidak mencapai target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan realisasi belanja pegawai sering kali melebihi dari target yang telah dianggarkan. Ini menunjukkan pada akhir tahun anggaran, pemerintah daerah lebih memprioritaskan untuk memenuhi target belanja melalui peningkatan belanja pegawai dari pada memenuhi target belanja modal, (Halim, 2014).

Belanja Modal dibagi menjadi beberapa jenis belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain :

1. Belanja Modal Tanah, merupakan seluruh pengeluaran untuk perolehan hak atas tanah.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, merupakan pengeluaran untuk pembelian alat-alat dan mesin yang nantinya digunakan untuk kegiatan.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, merupakan seluruh biaya untuk pembangunan gedung dan bangunan.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, merupakan seluruh pembangunan untuk pembangunan sarana dan prasarana jaringan pengairan, jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi dan jaringan lain yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana fisik distribusi instalasi.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya, seluruh biaya dalam rangka pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik. Contoh belanja modal fisik lainnya antara lain kontrak sewa beli,

pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, pembelian hewan ternak dan pengadaan buku-buku. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.

Terdapat beberapa jenis pengukuran belanja modal:

- a. Diukur besarnya proporsi realisasi belanja modal dari total belanja daerah tahun sebelumnya (t-1) karena kinerja keuangan terkait dengan periode masa lalu.

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal } t-1}{\text{Total Belanja daerah } t-1} \times 100\%$$

- b. Diukur menggunakan realisasi belanja modal yang disederhanakan dari nilaisatuan mata uang menjadi nilai satuan persentase dengan diprosikan menggunakan logaritma. Penggunaan logaritmaditujukan untuk mengurangi adanya fluktuasi data yang berlebih.

$$\text{Belanja Modal} = \text{Ln Total Realisasi Belanja Modal}$$

2.1.6 Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini berdasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.

Peacock dan Wiseman berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pemungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak masyarakat inilah yang menjadi kendala yang dapat membatasi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena (Mangkoesoebroto, 2010). Menurut Peacock dan Wiseman, perkembangan ekonomi akan menyebabkan pungutan pajak meningkat, meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak tersebut pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan dalam pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal semakin besar dan semakin bertambah.

Apabila dalam keadaan normal terdapat gangguan, misalkan karena adanya permasalahan ekonomi, maka pemerintah terpaksa harus memperhebat pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari antisipasi pemerintah ini adalah tuntutan untuk menambah penerimaan pajak. Pemungutan pajak yang lebih besar akan menyebabkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota atau daerah dan Pemerintah Pusat akan berkurang. Keadaan ini oleh Peacock dan Wiseman disebut sebagai efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial yang menyebabkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota atau daerah dialihkan kepada kinerja keuangan Pemerintah Pusat. Pengawasan gangguan terhadap keadaan normal seringkali tidak cukup dibiayai hanya oleh pajak,

sehingga pemerintah mungkin juga harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi, muncul kewajiban untuk membayar utang dan bunga, pengeluaran pemerintah akan membengkak karena kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut ialah meskipun gangguan telah usai, pajak tidak segera diturunkan ketingkat semula. Tidak turunnya tingkat pajak pada posisi semula setelah gangguan usai juga disebabkan oleh adanya efek inspeksi (*impeption effect*) dan efek konsentrasi (*concentration effect*). Kedua efek ini terjadi karena gangguan yang terjadi menyebabkan terjadinya konsentrasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota atau daerah ketangan pemerintah yang semula dari Pemerintah Pusat Kabupaten/Kota atau daerah. Hal tersebut akan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah. Kesadaran masyarakat inilah yang memungkinkan masyarakat mau membayar pajak lebih besar sehingga memungkinkan semakin besarnya penerimaan pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Sari & Mustanda, 2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Ukuran Pemerintah Daerah (X_1) Pendapatan Asli Daerah (X_2) Belanja Modal (X_3) Kinerja Keuangan (Y)	Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset yang dimiliki pemerintah daerah belum memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah
2.	(Lathifa, I., & Hasna, 2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di PROVINSI JAWA TENGAH Tahun 2013-2017	Pendapatan Asli Daerah (X_1) Belanja Modal (X_2) Kinerja Keuangan (Y)	Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.
3.	(Budianto, B., & Alexander, 2016)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara	PAD (X_1) Dana Perimbangan (X_2) Kinerja Keuangan (Y)	Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Dearah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli Dearah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah yang berarti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan kinerja keuangan pemrintah daerah.

				Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengakibatkan kenaikan Dana Perimbangan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
4.	(Andirfa, 2016),	Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh	Belanja Modal (X_1) Dana Perimbangan (X_2) Pendapatan Asli daerah (X_3) Kinerja Keuangan (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial menunjukkan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh
5.	(Nuwun, 2020)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah	PAD (X_1) Dana Perimbangan (X_2) Kinerja Keuangan (Y_1) Kesejahteraan Masyarakat (Y_2)	Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa secara parsial hanya ada dua variabel PAD dan DAU yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu secara simultan variabel PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

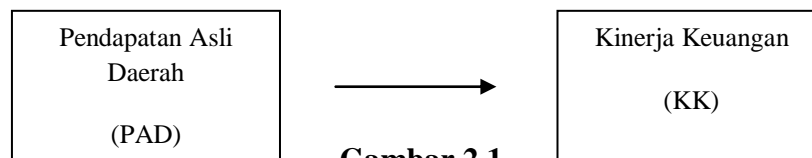
2.3 Kerangka Konseptual

2.3.1 PAD Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan penelitian (Cherrya Dhia Wenny, 2012) Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Secara parsial menyatakan bahwa hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian tersebut juga senada dengan penelitian (Julitawati et al., 2012) yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2009-2011. Swastika Enjang Prasasti juga melakukan penelitian pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013.



Gambar 2.1

Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

2.3.2 Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan penelitian (Yanto, 2014) menunjukkan bahwa, Dana Perimbangan (DP) secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Barat yang diukur menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan pada tahun 2009-2013. Penelitian tersebut juga senada dengan penelitian (Julitawati et al., 2012) yaitu, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2009-2011. Namun kedua penelitian di

atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prasasti & Sari, 2015) yang menunjukkan bahwa, Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2007-2013.



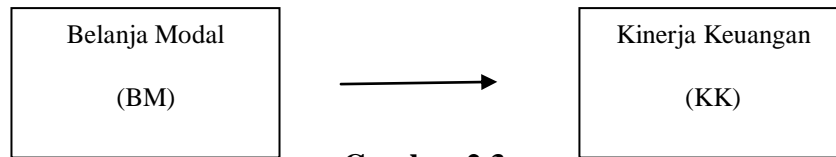
Gambar 2.2

Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

2.3.3 Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Masyarakat yang diwakilkan oleh legislatif selaku principal bagi Pemda (agen), harus terus melakukan kontrol terhadap pemerintah dalam proses pelaksanaan anggaran. Anggaran sangat sensitive karena realisasinya selain harus sesuai dengan tujuan juga bagaimana tingkat efisiensi, efektif dan ekonomis dari anggaran tersebut. Saah satu anggaran yang menyentuh angung dengan kebutuhan masyarakat adaah beanja modal. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah (Adi, 2017). Dalam penelitian (Anggraeni, 2016) menunjukkan bahwa secara empiris belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sedangkan dalam hasil perhitungan olah data menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan pada Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Namun tidak demikian pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman hasil menunjukkan tidak berpengaruh antara

belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening.



Gambar 2.3

Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

2.3.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

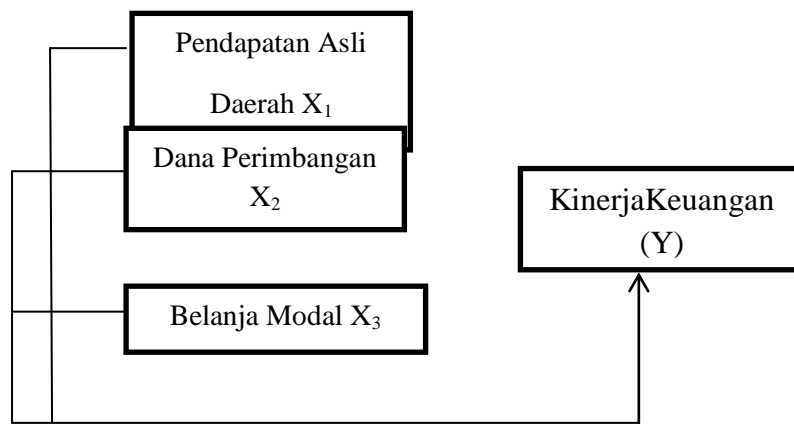
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah Revenue yang merupakan pendapatan pemerintah daerah yang digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, pendapatan daerah berasal dari dua sumber yaitu: Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Apabila semakin tinggi jumlah pendapatan daerah, maka semakin besar dana yang tersedia bagi pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah bersangkutan mampu menyediakan pelayanan jasa kepada masyarakat yang lebih baik. Jumlah pendapatan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kekuatan keuangan pemerintah daerah sehingga mampu memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.

Faktor kedua adalah Expenditure yang merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, belanja dibedakan menjadi belanja pembangunan dan belanja rutin. Selain itu, belanja pemerintah juga diklasifikasikan sebagai belanja operasional dan Belanja Modal. Jumlah Belanja Modal berpengaruh pada

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin besar atau tinggi jumlah Belanja Modal pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pertumbuhan pembangunan pemerintah daerah tinggi sehingga ada upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat.

Kerangka konseptual menjelaskan tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yang ingin diteliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis.

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.4

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan penjelasan tinjauan pustaka, peneliti membentuk kerangkakonseptual yang menggambarkan hubungan secara simultan antara variable independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan.

2.4 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2016) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- H₂: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- H₃: Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- H₄: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Penelitian dengan metode asosiatif menurut (Sugiyono, 2017) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian asosiatif ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi di Sumatera Utara.

3.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variable diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian.

Tabel 3.1

Variabel Operasional

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1.	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih dalam setahun anggaran dan	Ln. Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio

		tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.		
2.	Dana Perimbangan	Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.	Ln. Total Realisasi Dana Perimbangan	Rasio
3.	Belanja Modal	Belanja Modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil. Infrastruktur yang dibiayai dengan belanja modal nantinya akan mempercepat roda perekonomian sehingga perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa berjalan dengan lebih efisien dan efektif.	Ln. Total Realisasi Belanja Modal	Rasio
4.	Kinerja Keuangan	Kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$	

		penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.	
--	--	--	--

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang bertempat di Jl. Imam Bonjol No. 18 Gedung Bank Sumut Lt. 7 Kota Medan, Sumatera Utara.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan Juni sampai Oktober 2021.

Tabel 3.2

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan														
		Juni			Juli			Agustus			September			Oktober		
1.	Prariset/Riset															
2.	Pengajuan Judul															

3.	Penyusunan Proposal																		
4.	Bimbingan Proposal																		
5.	Seminar Proposal																		
6.	Pengumpulan Data																		
7.	Penyusunan Skripsi																		
8.	Bimbingan Skripsi																		
9.	Sidang Meja Hijau																		

3.4 Teknik Pengumpulan Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33 Kabupaten/Kota dengan periode waktu dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Kriteria yang dijadikan pemilihan populasi adalah kabupaten dan kota yang telah memiliki Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.3

Populasi Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota	No	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kab. Asahan	18.	Kota Tanjung Balai
2.	Kab. Dairi	19.	Kota Tebing Tinggi
3.	Kab. Deli Serdang	20.	Kota Padang Sidempuan
4.	Kab. Tanah Karo	21.	Kab. Pakpak Bharat

5.	Kab. Labuhan Batu	22.	Kab. Nias Selatan
6.	Kab. Langkat	23.	Kab. Humbang Hasundutan
7.	Kab. Mandailing Natal	24.	Kab. Serdang Bedagai
8.	Kab. Nias	25.	Kab. Samosir
9.	Kab. Simalungun	26.	Kab. Batu Bara
10.	Kab. Tapanuli Selatan	27.	Kab. Padang Lawas
11.	Kab. Tapanuli Tengah	28.	Kab. Padang Lawas Utara
12.	Kab. Tapanuli Utara	29.	Kab. Labuhan Batu Selatan
13.	Kab. Toba Samosir	30.	Kab. Labuhan Batu Utara
14.	Kota Binjai	31.	Kab. Nias Utara
15.	Kota Medan	32.	Kab. Nias Barat
16.	Kota Pematang Siantar	33.	Kab. Gunung Sitoli
17.	Kota Sibolga		

3.4.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut (Umar, 2014). sampel adalah sebagian untuk saja dari seluruh jumlah populasi, yang diambil dari populasi, yang diambil dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dianggap mewakili seluruh anggota populasi. Jumlah sampel yang diambil sebanyak jumlah populasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Teknik Pengambilan sampel yaitu

Purposive sampling. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel penelitian ini adalah :

1. Kabupaten/kota yang mempunyai Laporan Realisasi Anggaran yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan pada tahun 2017 s/d 2020 yang dapat diakses melalui situs Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (<http://bpkad.sumutprov.go.id/>)

Tabel 3.4

Sampel Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kab. Deli Serdang
2.	Kab. Tapanuli Tengah
3.	Kab. Tapanuli Utara
4.	Kab.Toba Samosir
5.	Kabupaten Samosir
6.	Kabupaten Labuhan Batu
7.	Kota Medan
8.	Kota Binjai
9.	Kota Sibolga
10.	Kota Gunung Sitoli

Tabel 3.5

Kriteria Penarikan Populasi dan Sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Keterangan	Kriteria	Jumlah
Populasi	Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2017 s/d 2020	33 Kabupaten/Kota
Sampel	1. Kabupaten/kota yang mempunyai Laporan Realisasi Anggaran terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara 2. Mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan pada tahun 2017 s/d 2020 yang dapat diakses melalui situs Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara (http://bpkad.sumutprov.go.id/)	10 Kabupaten/Kota

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan memanfaatkan data laporan keuangan pemerintah kab/kota Provinsi Sumatera Utara periode 2017 s/d 2020 yang telah tersedia sebagai informasi, data tersebut kemudian dikumpulkan dan dikaji. Data tersebut diperoleh dari situs yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara yaitu <http://bpkad.sumutprov.go.id/>

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis pengaruh dari Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuandangunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan dan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal. Untuk menguji datadan juga hipotesis penelitian maka dilakukan beberpa pengujian dengan bantuan *software* SPSS versi 23.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif yaitu menguji dan menganalisa data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut, dengan uji-uji dibawah ini :

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, maka dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar memperoleh hasil regresi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias. Uji asumsi klasik diantaranya yaitu:

a) Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2016), uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan di atas 0,05 maka data terdistribusi

normal. Sedangkan jika hasil *One Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2016).

b) Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016), uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik *scatterplot*, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan.

c) Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2016), uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

2. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai *VIF* > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

d) Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2016), uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi. Model regresi yang dianggap baik apabila terlepas dari autokorelasi. Dalam mendeteksi data apakah terdapat autokorelasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan menggunakan metode Durbin Watson. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *Durbin Waston* (DW) terletak antara du dan $(4 - dU)$ atau $du < DW < (4 - dU)$, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terbebas dari autokorelasi
2. Jika nilai *Durbin Waston* (DW) $< dL$ atau DW lebih besar dari $(4 - dL)$, maka dapat disimpulkan berarti terdapat autokorelasi

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2017). Penelitian ini, penulis menggunakan persamaan regresi linear berganda karena variabel bebas

dalam penelitian lebih dari satu. Adapun persamaan regresi linear berganda menurut (Sugiyono, 2017) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + x_1 \cdot b_1 + x_2 \cdot b_2 + x_3 \cdot b_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan

α = Konstanta

b_1, b_3 = Koefisien regresi variabel independen

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Perimbangan

X_3 = Belanja Modal

3.6.3 Uji Hipotesis

a) Uji t (Parsial)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara terpisah atau parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel independen. Untuk menguji signifikan hubungan, digunakan rumus uji statistik t sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber (Sugiyono, 2007)

Keterangan :

t = nilai hitung

r = koefisien korelasi

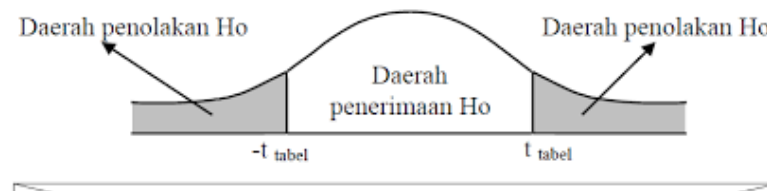
n = jumlah sampel

Kriteria yang digunakan sebagai dasar perbandingan sebagai berikut :

H_0 ditolak jika nilai t hitung $>$ t tabel

H_0 diterima jika nilai t hitung $>$ t tabel

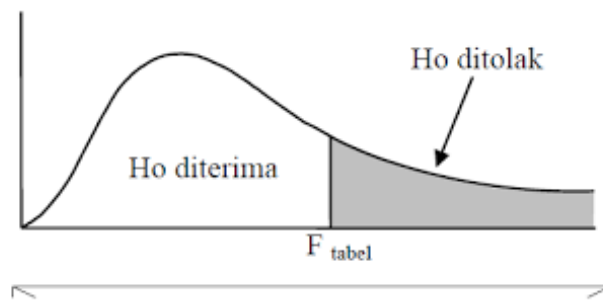
Jika H_0 diterima maka artinya pengaruh tidak signifikan, sedangkan jika H_0 ditolak artinya pengaruh signifikan.



Gambar 3.1
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

b) Uji F (simultan)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel dependen secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance* level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi tidak fit. Jika nilai signifikan lebih kecil dari α maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa model regresi fit.



Gambar 3.2
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi dengan cara melihat dari besarnya koefisien determinasi (R^2). Besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0 sampai 1. Apabila semakin R^2 mendekati 0 maka semakin kecil kemampuan semua variabel independen dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen. Sebaliknya, apabila semakin R^2 mendekati 1 maka semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Sejarah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara merupakan gabungan dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Biro Perlengkapan Pengelolaan Aset yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertugas untuk merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas yang dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berfungsi untuk:

1. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah serta pengelolaan aset
2. Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam pengelolaan aset
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut:

4.1.2 Visi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran para Aparatur Pemerintah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan berdayaguna, sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP).

Selaras akan hal itu, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

“Terwujudnya Sumber Daya Para Aparatur Pemerintah yang Profesional, Sistematis, Efektif dan Efisien dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Baik, Berdayaguna, Akuntabel Serta Transparan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku”

4.1.3 Misi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi tersebut dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik. Dengan adanya misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan visi dan memberikan kebijakan tentang tujuan yang akan diwujudkan, serta untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta memantapkan etos kerja, maka misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme, sistematis, efektif dan efisien para aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, disiplin anggaran, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

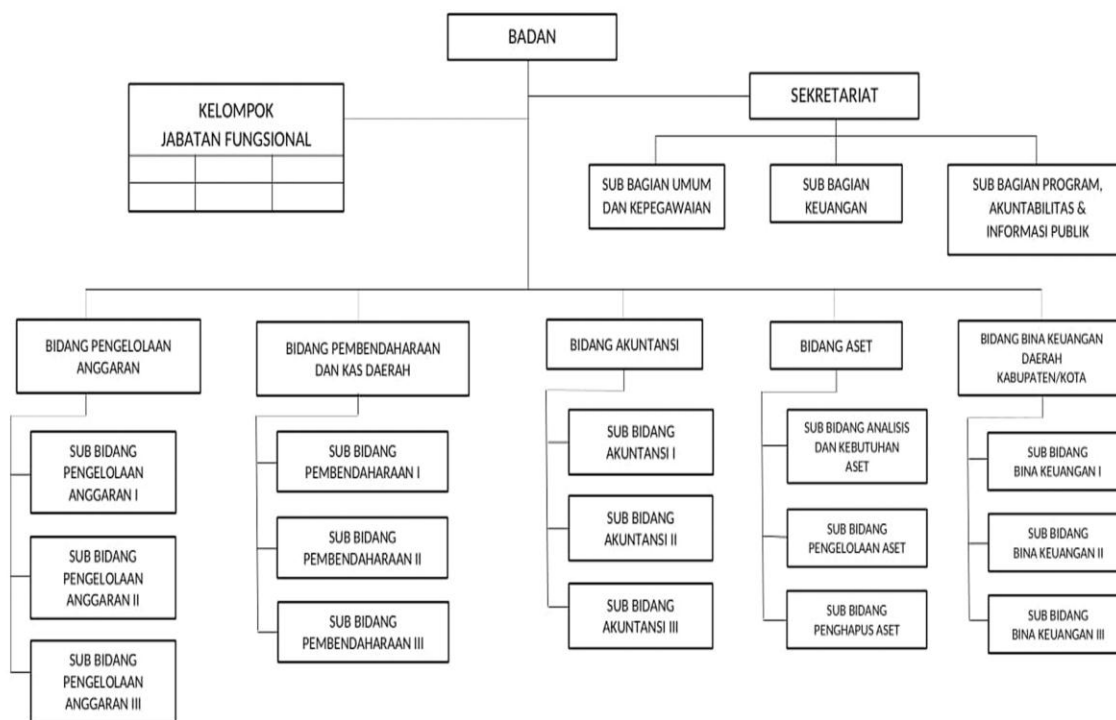
4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan gambaran sistematis tentang bagian tugas dan tanggung jawab serta hubungannya. Pada hakekatnya jumlah kegiatan dan hubungannya serta wewenang yang mempunyai fungsi terorganisir. Struktur Organisasi bukanlah merupakan tujuan akhir dari perusahaan tetapi merupakan alat perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, maka dapat dilihat dengan jelas bagian tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap bagian yang ada

didalamnya dalam melakukan kegiatan. Dengan adanya struktur organisasi dengan sempurna maka kegiatan dalam organisasi akan berjalan dengan lancar dan akan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. Hubungan kerja sama antara sekelompok orang yang terdapat dalam suatu organisasi. Secara umum pengertian dari struktur organisasi adalah merupakan suatu perusahaan, mulai dari tingkat yang paling atas hingga tingkat paling bawah, yang tersusun dengan sedemikian rupa pada suatu perusahaan. Adapun Struktur Organisasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan adalah sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TANGGAL 12 MARET 2018



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

tti

TENGKU ERRY NURADI

Gambar 4.1
Struktur Organisasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset
2. Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan mempunyai uraian tugas, yaitu:

1. Menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah

2. Menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang pengelolaan dan aset daerah sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
3. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan APBD
4. Menyelenggarakan serta mengesahkan:
 - DPA
 - SKPD/DPPA
5. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD
6. Menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
7. Menyelenggarakan penetapan SPD
8. Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
9. Menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah
10. Menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah
11. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan unit kerja agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras
12. Menyelenggarakan kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana dengan baik dan sesuai sasaran

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Badan dibantu oleh:

1. Sekretariat
2. Bidang Pengelolaan Anggaran
3. Bidang Perbendaharaan
4. Bidang Akuntansi
5. Bidang Aset
6. Unit Pelayanan Teknis Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tidak Bergerak
7. Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah I
8. Unit Penyuluhan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah II

4.2. Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan data terdistribusi normal. Jika asumsi klasik terpenuhi maka akan menghasilkan estimator yang sesuai *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), yang artinya model regresi dapat digunakan sebagai alat estimasi penelitian (Ghozali, 2016).

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Uji ini dapat dilihat dengan membandingkan Z hitung dengan Z tabel, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika Z hitung (*Kolmogorov Smirnov*) < Z tabel (1,96), atau angka signifikan > taraf signifikansi (α) 0,05; maka distribusi data dikatakan normal.
- b) Jika Z hitung (*Kolmogorov Smirnov*) > Z tabel (1,96), atau angka signifikan < taraf signifikansi (α) 0,05 distribusi data dikatakan tidak normal.

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.81492729
Most Extreme Differences	Absolute	.135
	Positive	.135
	Negative	-.111
Test Statistic		.135
Asymp. Sig. (2-tailed)		.063 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

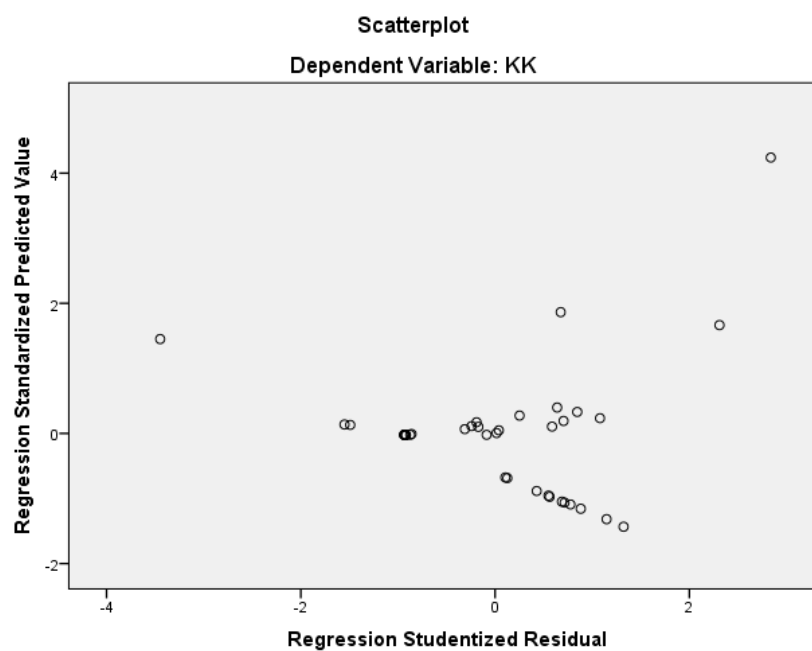
Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji statistik *kolmogorov-smirnov* dapat diketahui bahwa data variabel penelitian berdistribusi

normal karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,136 Karena nilai signifikan sebesar $0,063 > 0,05$ maka residual berdistribusi normal.

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot*.



Sumber: data diolah 2021

Gambar 4.2 Hasil Grafik *Scatterplot*

Dari grafik *scatterplot* setelah transformasi data gambar IV.1 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik telah menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y yang artinya model regresi tidak lagi mengalami masalah heteroskedastisitas.

c) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016), multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Berikut hasil dari uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.676	1.572		4.884	.000		
	PAD	3.294E-13	.000	1.001	8.641	.000	.578	1.731
	DP	-2.200E-13	.000	-.761	-6.634	.000	.590	1.694
	BM	-8.764E-14	.000	-.124	-1.035	.308	.537	1.864

a. Dependent Variable: KK

Sumber: data diolah 2021

Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF variabel penelitian lebih kecil dari 10. Adapun nilai *tolerance* variabel penelitian lebih besar dari 0,1. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan

ada problem autokorelasi (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji *Durbin Watson (DW test)*. Berikut ini disajikan hasil pengujian autokorelasi dengan metode *Durbin-Watson (DW)*.

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.849 ^a	.721	.697	8.13403	2.185

a. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD

b. Dependent Variable: KK

Sumber: data diolahpeneliti, 2021

Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas hasil uji autokorelasi setelah transformasi menunjukkan bahwa nilai $du < DW < 4-du$ atau $0.7529 < 2,185 < 2.247$, artinya model regresi bebas dari masalah autokorelasi.

4.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel citra merek, kualitas produk, kualitas pelayanan dengan variabel keputusan pembelian apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 4.4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.676	1.572		4.884	.000		
PAD	3.294	.000	1.001	8.641	.000	.578	1.731
DP	-2.200	.000	-.761	-6.634	.000	.590	1.694
BM	-8.764	.000	-.124	-1.035	.308	.537	1.864

a. Dependent Variable: KK

Dari tabel di atas, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$Y = 7,677 + 3,294X_1 - 2,200X_2 - 8,764X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- a. Variabel pendapatan asli daerah mempunyai arah koefisien yang bertanda positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana perimbangan belanja modal mempunyai arah koefisien yang bertanda negative terhadap kinerja keuangan
- b. Koefisien pendapatan asli daerah memberikan nilai sebesar 3,294 yang berarti bahwa meningkatnya pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan.
- c. Koefisien dana perimbangan nilai sebesar -2,200 yang berarti bahwa menurunnya dana perimbangan dapat meningkatkan kinerja keuangan.
- d. Koefisien belanja modal sebesar -8,764 yang berarti bahwa menurunnya belanja modal dapat meningkatkan kinerja keuangan.

4.2.3 Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis ialah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol).

a) Uji t

Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah atau parsial. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis secara parsial:

Tabel 4.5
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.676	1.572		4.884	.000		
PAD	3.294E-13	.000	1.001	8.641	.000	.578	1.731
DP	-2.200E-13	.000	-.761	-6.634	.000	.590	1.694
BM	-8.764E-14	.000	-.124	-1.035	.308	.537	1.864

a. Dependent Variable: KK

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan maka, H_1 dapat diterima.
2. Nilai signifikansi Dana Perimbangan sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan maka, H_2 dapat diterima.
3. Nilai signifikansi Belanja Modal sebesar $0,308 > 0,05$ menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan maka, H_3 ditolak.

b) Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variable independen secara bersama-sama (serentak) mempunyai pengaruh terhadap variable dependen. Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance* level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi tidak fit. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa model regresi fit.

Tabel 4.6
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6143.455	3	2047.818	30.951	.000 ^b
	Residual	2381.850	36	66.163		
	Total	8525.306	39			

a. Dependent Variable: KK

b. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.5 di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, dengan demikian dapat dilihat bahwa nilai signifikansi menunjukkan $< 0,05$, artinya bahwa model ini layak untuk digunakan pada penelitian terhadap kinerja keuangan.

4.2.4 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk menguji kemampuan model regresi variabel penelitian. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.849 ^a	.721	.697	8.13403	2.185

a. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD

b. Dependent Variable: KK

Sumber: data diolah, 2021

Menurut Ghozali (2016), peneliti dianjurkan untuk menggunakan nilai R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik karena R dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, nilai R^2 adalah 0,721. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen adalah sebesar 72,1%, sedangkan sisanya sebesar 28,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Julitawati et al., 2012) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan yang bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tingginya penerimaan PAD akan memaksimalkan pemerintah dalam pembangunan pemerintahan daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berupa pendapatan

yang berasal dari daerah itu sendiri dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena nantinya pendapatan asli daerah yang merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembangunan daerah sehingga terciptanya daerah yang memiliki kemandirian daerah dan dapat terciptanya otonomi daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Besarnya penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD pada suatu periode dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja sesuai dengan kehendak pemerintah daerah. Pada umumnya PAD digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi belanja dalam sektor-sektor produktif, misalnya belanja modal dan belanja barang dan jasa yang berkaitan secara langsung terhadap peningkatan program kerja pemerintah daerah. Dari peningkatan program kerja pemerintah tersebut maka pembangunan daerah akan meningkat dan sarana-prasarana daerah semakin memadai untuk menunjang peningkatan PAD di tahun berikutnya, sehingga dari peningkatan PAD tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah.

4.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Julitawati et al., 2012) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja

keuangan. Dana perimbangan adalah sumber lain sebagai pembentuk pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan. Dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dana perimbangan yang semakin tinggi diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat akan menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang semakin rendah atau menurun. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Tingkat kemandirian daerah yang rendah akan menunjukkan kinerja keuangan yang lemah atau kurang baik.

Dana perimbangan adalah sumber lain sebagai pembentuk pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah. Semakin besar dana perimbangan yang

diperoleh oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat memerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dana perimbangan yang semakin tinggi diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang semakin rendah atau menurun. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Tingkat kemandirian daerah yang rendah akan menunjukkan kinerja keuangan yang lemah atau kurang baik. Karena semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan

4.3.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh nilai signifikan sebesar $0,308 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini tidak

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni, 2016) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya pengaruh dari belanja modal yang diasumsikan adalah pengeluaran kas pemerintah daerah untuk menambah aset tetap yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa adanya belanja modal yang berwujud aset tetap tidak serta merta menjadi cerminan bahwa dengan belanja modal yang dapat menjadi cerminan kinerja keuangan yang baik justru malah sebaliknya, belanja modal dapat menjadi objek pemborosan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks lain yang mana belanja modal seharusnya dapat bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan daerah justru menjadi tidak bermanfaat ketika pemerintah daerah salah sasaran dalam melaksanakan belanja modal yang tidak sesuai dengan daerahnya, sehingga tidak terciptanya benefit dan impact kepada daerah tersebut sehingga sulit untuk mencerminkan kinerja keuangan yang baik dalam pemerintah daerah.

Karena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan semakin meningkatnya alokasi Belanja Modal menunjukkan peningkatan investasi yang dilakukan sehingga semakin tinggi Kinerja Keuangan. Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Belanja Modal yang baik dari segi seorang manajer di suatu entitas pemerintahan di daerah yaitu kepala daerah harus

paham betul asas yang berlaku serta ukuran Kinerja untuk menilai keberhasilan setiap kegiatan yang dikelola secara tertib, taat peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Ada pun ukuran keberhasilan dari segi Belanja Modal menurut (Halim, 2014) adalah lima tepat, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tetap sasaran, dan tetap harga. Sehingga banyaknya dana yang dialokasikan untuk Belanja Modal maka nantinya dapat mewujudkan terciptanya infrastruktur dan sarana yang semakin baik dan tepat. Tersedianya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi diberbagai sektor dan produktivitas masyarakat semakin tinggi dan terjadi peningkatan kesejahteraan. Sementara itu apabila semakin banyak pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah maka nantinya dapat pula meningkatkan pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pengalokasian Belanja Modal secara tepat dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga dapat meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, pengalokasian yang lebih banyak pada Belanja Modal nantinya dapat membantu masyarakat dalam pembangunan dan juga diharapkan diperolehnya sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah.

4.3.4 Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil pengujian statistic F diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, belanja modal dan kinerja keuangan. Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0,721 atau 72,1 yang artinya kinerja

keuangan Provinsi Sumatera Utara pada BPKAD Sumatera Utara dapat dijelaskan oleh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal sebesar 72,1%.

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah menekankan hasil atas PAD mereka berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang-Undang.

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu, untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, adanya kewajiban pemerintah pusat kepada daerah masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga diperlukan Dana Perimbangan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Belanja Modal mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dengan alasan bahwa belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Provinsi Sumatera Utara.
2. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Provinsi Sumatera Utara.
3. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Provinsi Sumatera Utara.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Provinsi Sumatera Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, berikut saran yang dapat peneliti berikan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara:

1. Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara perlu untuk mengurangi dana perimbangan sehingga tingkat ketergantungan keuangan daerah menurun.
2. Pemerintah Kabupaten Sumatera Utara perlu untuk meningkatkan alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah dan efisiensi belanja daerah. Belanja daerah yang dialokasikan secara efisien dengan menerapkan

prinsip kehati-hatian dan transparansi di dalamnya juga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini dan perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada periode waktu 4 tahun anggaran dan terbatas pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara saja, sehingga hasil penelitian kurang akurat jika digunakan pada populasi yang lebih luas.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal saja, mengingat masih banyak faktor lain yang juga memengaruhi kinerja keuangan daerah.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada 3 rasio keuangan dan 2 rasio belanja daerah untuk mengukur kinerja keuangan daerah, mengingat masih banyak rasio lain untuk mengukur kinerja keuangan daerah.
4. Pengembangan Penelitian Selanjutnya Untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang misal 10 tahun anggaran, dapat menambah kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel, dapat menambah variabel yang lebih banyak, dan dapat menambah rasio keuangan, sehingga hasil penelitian akan lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. (2017). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*, 2(1), 1–20.
- Anggraeni, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1–18.
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8707>
- Ardila, I. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 1–9.
- Budiadi, D. (2018). Pengukuran Kinerja Keuangan Koperasi Dengan Analisis Rasio. *Jurnal Cahaya Aktiva*, 01(01), 29–34.
http://www.cahayasurya.ac.id/jurnal/file/Hal_29_34_Dwi_Budiadi.pdf
- Budianto, B ., & Alexander, S. W. (2016). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(4), 844–851.
- Cherrya Dhia Wenny. (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP Hal -39*, 2(1), 39–51.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2009). Pengaruh Return On Asset (Roe), Return On Equity (Roe), Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 3(2), 12–20.
- Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

- (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 15–29.
- Kawedar. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Buku 1*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khairunnisa, I. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–10.
- Lathifa, I., & Hasna, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*, 2(1), 1–12.
- Mamuka, V., & Elim, I. (2014). Analisis Dana Transfer Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA*, 2(1), 646–655.
- Mangkoesebroto. (2010). *Dasar Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah. In Ekonomi Publik*. BPF.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mulia, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 1(1), 30–38.
- Nuwun, P. (2020). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. *Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 1(2), 30–41.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability*, 6(1), 45–56.
- Prasasti, S., & Sari, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Diy Tahun 2007-2013). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 1–13.

- Santoso, I., & Suparta, I. W. (2015). Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 135–165.
- Saragih. (2013). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Cetakan Pertama*. Ghalia Indonesia.
- Saragih, F. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar Of Social Sciences Engineering & Humaniora E-ISSN 2775-4049 SCENARIO 2020*.
- Sari, I. P. & Agusti, R. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/kota Pulau Sumatra). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 679–692.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis* (A. Nuryanto (ed.); 7th ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2017a). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. In Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sugiyono, S. (2017b). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV. Alfabeta.
- Umar, H. (2014). *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi* (Keenam). PT. SUN.
- Wibowo. (2014). *Manajemen Kinerja . Edisi Keempat*. Rajawali Pers.

Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Kab/ Kota	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal	KK
1.	Kab. Asahan	2017	12.368.730.487.859	1.364.133.720.884.400	35.014.602.821.980	0,09
		2018	14.952.048.711.329	11.766.214.574.870	230.200.116.402	1,27
		2019	149.647.030.441	1.198.101.351.385	304.478.575.304	0,13
		2020	15.930.833.349.194	107.118.560.667.100	14.698.302.306.525	0,15
2.	Kab. Dairi	2017	12.848.975.133.188	790.001.619.650	26.070.596.896.400	16,26
		2018	7.390.682.960.345	951.857.095.064	201.561.437.852	7,76
		2019	74.360.339.717	826.507.837.823	197.567.865.963	0,09
		2020	8.975.899.787.384	855.999.183.000	13.959.877.798.880	10,49
3.	Kab. Deli Serdang	2017	84.928.615.115.113	1.987.560.013.808	74.145.689.703.263	42,73
		2018	72.964.859.448.868	1.992.298.798.336	670.584.193.040	36,62
		2019	1.167.794.977.442	2.000.833.953.988	703.280.070.640	0,58
		2020	80.971.982.926.842	183.729.462.298.800	48.030.532.565.190	0,44
4.	Kab. Tanah Karo	2017	15.786.672.097.613	832.636.278.000	33.953.524.097.711	18,96
		2018	1.319.020.016.711	970.993.634.321	804.270.116.711	1,36
		2019	1.773.705.129	1.531.356.154	757.048.872	1,16
		2020	1.379.102.962	1.379.111.962	685.819.658	1,00
5.	Kab. Labuhan Batu	2017	12.467.401.737.534	908.583.176.239	27.792.102.065.300	13,72
		2018	16.279.447.201.674	908.583.176.239	139.178.414.287	17,92
		2019	175.335.685.316	935.148.005.724	238.729.009.917	0,19
		2020	16.148.660.911.915	80.335.912.740.100	13.662.134.387.900	0,20
6.	Kab. Langkat	2017	13.971.764.785.509	1.868.902.371.908	52.716.870.172.216	7,48
		2018	1.834.309.558.986	1.832.309.558.986	1.340.032.943.000	1,00
		2019	2.491.123.054	2.226.184.130	1.212.698.537	1,12
		2020	1.941.036.354	1.941.036.354	1.086.116.531	1,00
7.	Kab. Mandailing	2017	8.058.168.893.702	1.086.204.333.000	26.824.339.753.800	7,82
		2018	8.480.992.349.646	1.071.095.267.000	199.849.014.896	7,92

	Natal	2019	98.758.815.327	979.280.101	206.392.843.127	10,84
		2020	9.045.477.718.454	741.093.645.	13.815.220.087.464	12,58
8.	Kab. Nias	2017	9.572.616.774.420	59.949.352.008.400	23.952.386.063.100	0,16
		2018	8.875.460.611.477	611.725.678.757	207.016.876.762	14,91
		2019	107.632.139.179	621.468.917.081	190.454.026.585	0,17
		2020	10.375.539.288.174	54.790.503.401.400	14.534.576.861.640	0,19
9.	Kab. Simalun gun	2017	25.266.301.552.868	165.191.353.446.700	29.371.345.061.800	0,15
		2018	3.156.679.451.580	2.816.179.451.580	1.688.946.321.000	1,12
		2019	2.442.089.255	2.347.472.353	1.243.341.478	1,04
		2020	2.426.599.490	2.426.599.589	1.126.357.674	1,00
10.	Kab. Tapanul i Selatan	2017	11.744.894.750.400	83.302.784.892.400	27.723.185.274.100	0,14
		2018	1.259.997.958.244	1.243.242.590.237	920.379.409.000	1,01
		2019	1.588.288.029	1.482.795.842	659.619.123	1,07
		2020	1.565.235.574	1.565.235.575	591.887.671	1,00
11.	Kab. Tapanul i Tengah	2017	7.271.030.859.053	832.636.278.000	16.752.131.440.309	8,73
		2018	7.666.088.341.033	905.749.933.000	220.747.371.092	8,46
		2019	88.441.123.323	863.854.168.332	219.450.399.719	0,10
		2020	8.746.931.763.221	84.479.694.535.100	24.431.643.935.800	0,10
12.	Kab. Tapanul i Utara	2017	15.806.727.985.800	82.836.161.595.900	15.584.495.391.011	0,19
		2018	11.516.030.220.100	868.012.988.517	181.662.031.563	13,27
		2019	123.753.915.831	898.881.627.467	194.947.102.674	0,14
		2020	13.337.509.496.544	80.957.022.480.700	33.915.997.933.936	0,16
13.	Kab. Toba Samosir	2017	5.484.082.364.603	798.493.519.928	19.923.003.116.025	6,87
		2018	5.229.896.580.340	716.254.774.000	152.970.216.966	7,30
		2019	68.046.526.605	735.587.572.963	135.339.350.834	0,09
		2020	5.740.316.293.328	65.935.863.265.300	6.658.319.921.700	0,09
14.	Kota Binjai	2017	13.921.762.169.748	719.167.216.158	15.405.996.229.396	19,36
		2018	13.587.092.063.289	725.647.284.000	214.254.227.112	18,72
		2019	108.954.525.370	722.172.307.255	127.213.320.411	0,15
		2020	11.227.358.610.162	66.581.131.600.000	10.221.580.925.911	0,17

15.	Kota Medan	2017	173.975.692.263.350	212.276.941.979.679.300	99.747.599.190.200	0,82
		2018	163.620.451.468.353	2.157.180.424.946	735.996.886.210	75,85
		2019	1.829.665.882.248	2.156.807.334.247	992.661.245.694	0,85
		2020	150.948.358.816.701	205.622.307.397.800	30.827.827.805.733	0,73
16.	Kota Pematang Siantar	2017	10.544.599.320.423	76.454.744.576.200	26.283.598.678.400	0,14
		2018	997.384.585.394	977.912.719.161	808.465.215.000	1,02
		2019	1.070.253.953.475	948.523.364	597.491.807	1,13
		2020	1.052.660.950	1.052.660.950	546.406.258	1,00
17.	Kota Sibolga	2017	10.367.220.393.817	49.049.963.981.800	12.482.437.493.652	0,21
		2018	8.124.573.381.160	512.639.624.901	142.467.823.362	15,85
		2019	69.312.217.832	502.391.227.055	81.569.259.139	0,14
		2020	7.953.931.641.203	46.420.815.400.800	8.604.123.737.600	0,17
18.	Kota Tanjung Balai	2017	6.510.826.661.552	53.980.490.006.000	12.495.057.956.400	0,12
		2018	831.473.050.228	625.773.050.228	530.190.296.000	1,33
		2019	656.100.953	648.523.364	597.491.807	1,13
		2020	744.302.284	745.464.770	398.745.108	1,00
19.	Kota Tebing Tinggi	2017	1.132.287.468.717	56.691.782.968.400	18.415.616.247.800	0,02
		2018	790.416.665.396	704.172.428.178	547.815.047.000	1,12
		2019	744.910.136	419.071.661	712.955.521	1,78
		2020	600.925.434	656.652.861	380.088.729	0,92
20.	Kota Padang Sidempuan	2017	10.964.041.928.055	67.318.939.711.800	18.409.396.756.676	6,62
		2018	7.506.357.509.273	641.432.737.569	184.093.967.563	11,70
		2019	87.432.283.185	693.704.664.731	856.448.347	0,13
		2020	6.400.414.263.459	60.384.664.595.600	6.637.904.947.614	0,11
21.	Kab. Pakpak Bharat	2017	2.932.048.744.676	442.967.749.000	13.836.342.736.676	6,62
		2018	2.006.120.792.274	431.431.968.000	118.336.626.935	4,65
		2019	33.515.937.645	462.549.741.238	145.937.021.774	0,07
		2020	2.169.079.928.298	39.512.004.534.200	6.370.228.729.500	0,05
22.	Kab. Nias	2017	1.845.026.670.007	768.617.877.771	22.232.843.792.400	2,40
		2018	1.960.573.478.242	771.694.298.994	221.305.834.645	2,54

	Selatan	2019	25.664.883.761	859.504.478.763	238.978.343.319	0,03
		2020	1.659.889.414.570	96.846.432.032.000	29.343.451.312.526	0,02
23.	Kab. Humbang Hasundutan	2017	8.559.835.702.701	71.993.323.187.600	22.470.295.370.700	0,12
		2018	9.273.585.381.293	681.797.476.833	168.860.963.829	13,60
		2019	73.757.931.630	707.685.265.766	177.278.522.408	0,10
		2020	6.793.769.474.672	64.988.803.158.300	11.846.493.559.900	0,10
24.	Kab. Serdang Bedagai	2017	10.731.129.022.863	102.414.817.038.300	23.860.491.131.100	0,10
		2018	16.438.297.221.304	1.128.928.302.000	349.104.338.217	17,22
		2019	1.647.549.345	1.577.040.180	797.088.981	1,05
		2020	1.603.911.841	1.665.849.841	722.092.473	0,96
25.	Kab. Samosir	2017	4.744.662.338.936	615.308.732.000	186.281.849.902	7,71
		2018	4.744.662.338.936	615.308.732.000	186.281.849.902	7,71
		2019	60.497.449.963	636.204.549.291	164.093.834.379	0,10
		2020	6.037.380.662.991	54.554.098.893.300	10.796.658.063.827	0,11
26.	Kab. Batubara	2017	6.694.479.637.652	78.199.782.428.000	16.442.000.264.600	0,09
		2018	6.322.591.617.300	784.874.225.863	139.977.493.680	8,06
		2019	1.335.269.414	1.208.154.445	625.198.759	1,11
		2020	1.257.910.799	1.356.120.136	559.938.068	0,93
27.	Kab. Padang Lawas	2017	52.299.754.095	715.103.544.000	247.447.823.079	0,07
		2018	5.652.905.975.000	961.343.088.579	221.963.650.130	5,88
		2019	13.475.924.959	743.812.943.726	204.458.003.516	0,02
		2020	4.405.562.127.444	72.202.863.417.100	14.336.654.180.800	0,06
28.	Kab. Padang Lawas Utara	2017	7.452.491.969.280	70.933.308.017.600	31.257.117.220.000	0,11
		2018	7.430.609.749.989	700.703.635.068	196.036.175.259	10,60
		2019	42.929.111.657	763.032.737.308	247.484.629.027	0,06
		2020	5.196.961.958.800	69.557.253.549.600	15.215.518.088.300	0,07
29.	Kab. Labuhan Batu Selatan	2017	41.169.542.000	741.734.194.000	227.492.997.052	0,06
		2018	930.600.477.992	889.737.191.660	719.576.678.000	1,05
		2019	1.025.077.259	950.982.910	522.537.176	1,08
		2020	1.048.005.583	1.048.005.583	479.053.624	1,00

30.	Kab Labuhan Batu Utara	2017	43.182.972.000	707.636.391.000	74.592.574.628	0,06
		2018	5.701.069.054.581	8.642.562.014.242	223.037.632.087	6,60
		2019	70.122.562.532	817.231.451.960	258.116.878.081	0,09
		2020	5.549.409.570.223	71.952.716.992.900	10.341.624.303.659	0,08
31.	Kab. Nias Utara	2017	7.517.385.818.570	55.570.664.734.600	25.167.586.917.500	0,14
		2018	14.068.379.741.907	564.777.933.815	195.095.726.869	24,91
		2019	57.961.363.629	659.120.965.964	258.215.519.657	0,09
		2020	5.887.896.997.409	55.900.474.498.900	17.799.276.057.578	0,11
32.	Kab. Nias Barat	2017	36.239.996.548	506.809.585.092	199.747.992.746	0,07
		2018	739.404.521.465	709.049.265.465	576.283.975.000	1,04
		2019	772.659.821	710.942.947	359.696.080	1,09
		2020	857.534.77	857.532.770	332.435.947	1,00
33.	Kota Gunung Sitoli	2017	3.652.570.620.000	54.684.808.257.400	24.961.759.885.250	0,07
		2018	3.406.628.577.760	552.039.778.301	183.521.284.315	6,17
		2019	35.209.121.388	559.094.823.827	156.757.286.042	0,06
		2020	2.553.025.295.337	52.918.658.877.900	14.587.761.473.600	0,05

Data Kinerja Keuangan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Rasio Kemandirian

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Keterangan
2017	168,21%	Sangat Baik
2018	355,24%	Sangat Baik
2019	26,98%	Rendah
2020	37,04%	Rendah

Data Surplus/Defisit (Anggaran) Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kab/Kota	Tahun	Total Pendapatan	Total Belanja	Keterangan
Kab. Deli Serdang	2017	844.661.608.525	3.742.554.992.965	(2.897.893.384.440)
	2018	3.640.579.921.809	3.822.171.768.018	181.591.846.209)
	2019	4.009.331.169.223	4.117.510.420.191	(108.179.250.968)
	2020	3.620.159.870.638	3.699.187.861.349	(79.027.990.711)
Kab. Tapanuli Tengah	2017	1.123.424.056.879	1.048.412.637.591	75.011.419.288
	2018	1.255.903.303.259	1.140.489.722.668	(94.267.235.835)
	2019	1.255.611.869.758	1.349.879.105.611	(94.267.235.853)
	2020	1.215.015.381.545	1.398.159.729.915	(183.144.384.370)
Kab. Tapanuli Utara	2017	1.231.044.439.187	1.273.906.756.787	(42.862.317.600)
	2018	1.313.649.617.104	1.369.671.636.252	(56.022.019.148)
	2019	1.343.753.897.013	1.388.428.656.501	(44.674.759.488)
	2020	103.038.584.850	1.655.119.008.883	(1.552.080.424.033)
Kab. Toba Samosir	2017	1.144.993.009.515	867.991.104.484	277.001.905.031
	2018	1.025.891.585.709	840.920.337.688	168.971.248.021
	2019	1.105.275.707.690	1.144.541.013.207	(39.265.305.517)
	2020	995.712.384.095	1.049.082.730.982	(53.370.346.887)
Kab. Samosir	2017	868.227.131.188	791.096.977.360	95.130.153.828
	2018	775.520.026.980	699.423.944.108	76.096.082.800
	2019	64.942.653.826	905.247.212.236	(840.304.558410)
	2020	820.098.780.819	866.633.884.458	(46.535.103.639)
Kab. Labuhan Batu	2017	1.290.315.127.083	1.244.403.744.949	45.911.382.134
	2018	1.277.566.050.295	1.386.434.351.725	(108.868.301.430)
	2019	1.500.609.870.663	1.579.560.837.215	(78.950.966.547)
	2020	1.315.981.548.668	1.347.148.302.852	(31.166.754.184)
Kota Medan	2017	5.523.623.117.419	5.554.084.308.979	(30.461.191.560)
	2018	5.239.408.011.116	5.451.085.765.928	(211.677.754.812)
	2019	6.257.239.035.331	6.304.555.945.273	(47.316.909.942)
	2020	4.757.852.448.866	5.254.667.074.399	(496.814.625.533)
Kota Binjai	2017	964.903.163.076	978.587.608.010	(13.684.444.934)
	2018	1.016.120.996.332	1.046.263.020.045	(30.142.023.713)
	2019	181.288.178.600	1.065.634.126.708	(884.345.945.108)
	2020	984.656.093.498	992.042.718.495	(7.86.624.997)
Kota Sibolga	2017	641.144.963.392	658.827.201.482	(17.682.238.090)
	2018	697.755.443.293	718.337.612.566	(20.562.169.273)
	2019	643.240.051.780	644.821.134.678	(10.581.082.898)
	2020	625.407.542.812	648.166.634.061	(22.759.091.249)
Kota Gunung Sitoli	2017	719.270.111.464	844.661.608.525	(125.391.497.061)
	2018	719.325.445.542	912.830.465.918	(193.505.020.376)
	2019	732.766.971.317	923.794.255.229	(191.027.283.912)
	2020	715.112.776.051	753.470.570.374	(38.357.749.323)

Data Surplus/Defisit (Realisasi) Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kab/Kota	Tahun	Total Pendapatan	Total Belanja	Keterangan
Kab. Deli Serdang	2017	3.332.039.840.502	3.377.738.242.083	(45.698.401.581)
	2018	3.363.304.583.385	3.422.610.573.014	(59.305.989.629)
	2019	3.573.056.389.618	3.601.407.369.876	(28.350.980.258)
	2020	3.335.349.826.580	3.274.161.220.722	61.188.605.858
Kab. Tapanuli Tengah	2017	1.094.002.131.630	981.439.903.033	112.562.228.597
	2018	1.216.899.572.344	1.001.324.391.936	215.575.180.408
	2019	1.206.241.246.106	1.226.312.258.777	(20.071.012.671)
	2020	1.185.787.162.520	1.262.417.323.849	(76.630.161.329)
Kab. Tapanuli Utara	2017	1.221.109.579.448	1.203.503.299.521	17.606.279.927
	2018	1.290.537.707.622	1.293.977.148.593	(3.439.440.971)
	2019	1.333.001.122.805	1.306.760.873.866	26.240.248.939
	2020	1.290.868.909.824	1.486.351.970.646	(195.483060.822)
Kab. Toba Samosir	2017	1.143.385.638.313	977.145.758.410	166.239.879.903
	2018	994.826.109.404	915.154.134.001	79.671.975.403
	2019	1.075.193.000.279	1.061.087.958.908	14.105.041.371
	2020	1.006.299.214.620	997.957.281.587	8.341.933.033
Kab. Samosir	2017	823.802.199.615	715.279.556.480	108.522.643.135
	2018	802.686.254.059	664.127.057.315	138.559.196.744
	2019	885.111.158.054	855.013.190.480	30.097.967.574
	2020	798.541.589.906	808.468.951.865	(9.927.361.959)
Kab. Labuhan Batu	2017	1.164.296.889.256	1.121.241.908.878	43.054.980.378
	2018	1.221.119.537.810	1.150.307.799.140	70.811.738.670
	2019	1.318.715.109.320	1.367.519.966.301	(48.804.456.981)
	2020	1.177.755.366.136	1.187.860.181.508	(10.104.815.372)
Kota Medan	2017	4.409.065.482.200	4.395.825.169.224	13.240.312.976
	2018	4.253.618.758.532	4.215.003.353.126	38.615.405.406
	2019	5.518.768.106.206	5.060.725.686.081	458.042.420.125
	2020	4.121.585.751.572	3.993.254.230.493	128.331.521.079
Kota Binjai	2017	879.551.758.424	849.025.483.683	30.526.274.741
	2018	901.168.855.458	934.014.777.704	(32.845.922.246)
	2019	910.979.480.197	905.176.183.077	5.803.297.120
	2020	881.734.638.292	879.245.168.648	2.489.469.644
Kota Sibolga	2017	615.864.227.562	597.687.532.071	18.176.695.491
	2018	622.367.464.687	636.738.976.516	(14.371.511.829)
	2019	610.446.000.905	581.264.116.046	29.181.884.859
	2020	617.321.840.304	568.424.346.936	48.897.493.368
Kota Gunung Sitoli	2017	691.423.299.086	778.005.373.504	(86.582.074.418)
	2018	702.840.277.058	702.837.581.847	2.695.211
	2019	730.739.514.033	732.295.074.460	(1.555.560.427)
	2020	703.793.539.789	719.249.942.771	(15.456.402.982)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	40	32209121388.00	173975692263350.0	23740679367004.57	44944908601586
DP	40	502391227055.00	212276941679300.0	29537151585433.10	51126670673412
BM	40	81569259159.00	99747599190200.00	13420389907972.04	21001321655835
KK	40	.05	75.85	7.8224	.11300
Valid N (listwise)	40				14.78505

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.81492729
Most Extreme Differences	Absolute	.135
	Positive	.135
	Negative	-.111
Test Statistic		.135
Asymp. Sig. (2-tailed)		.063 ^c

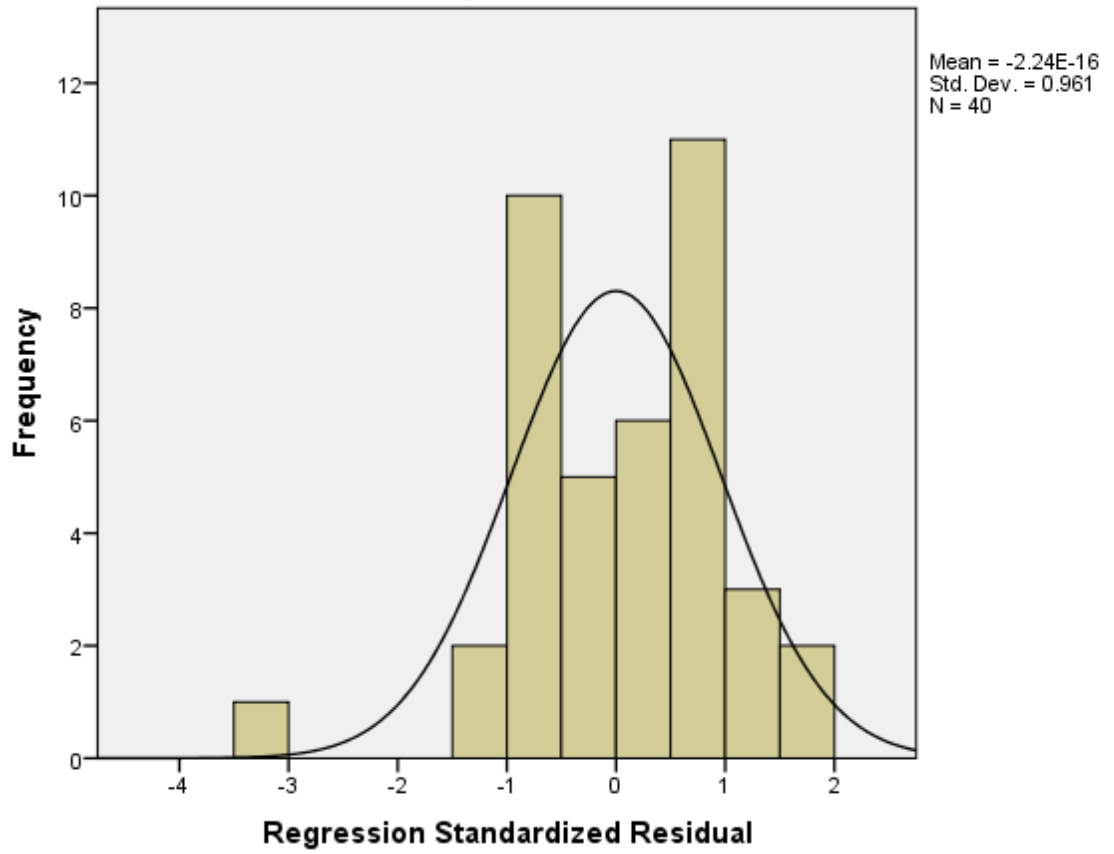
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

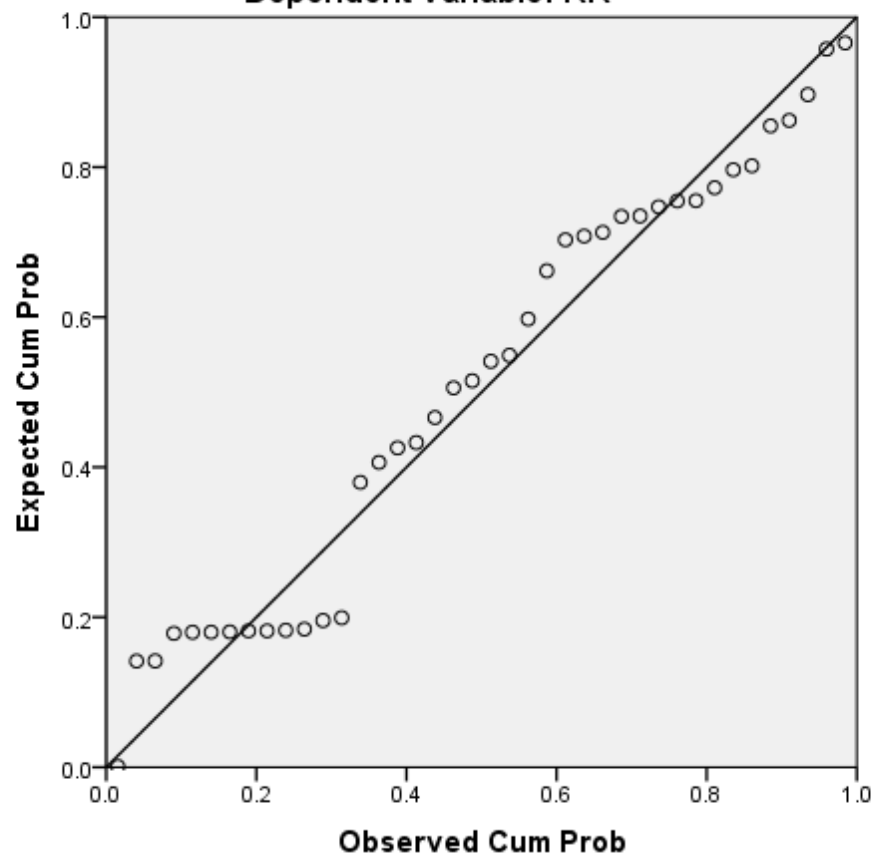
Histogram

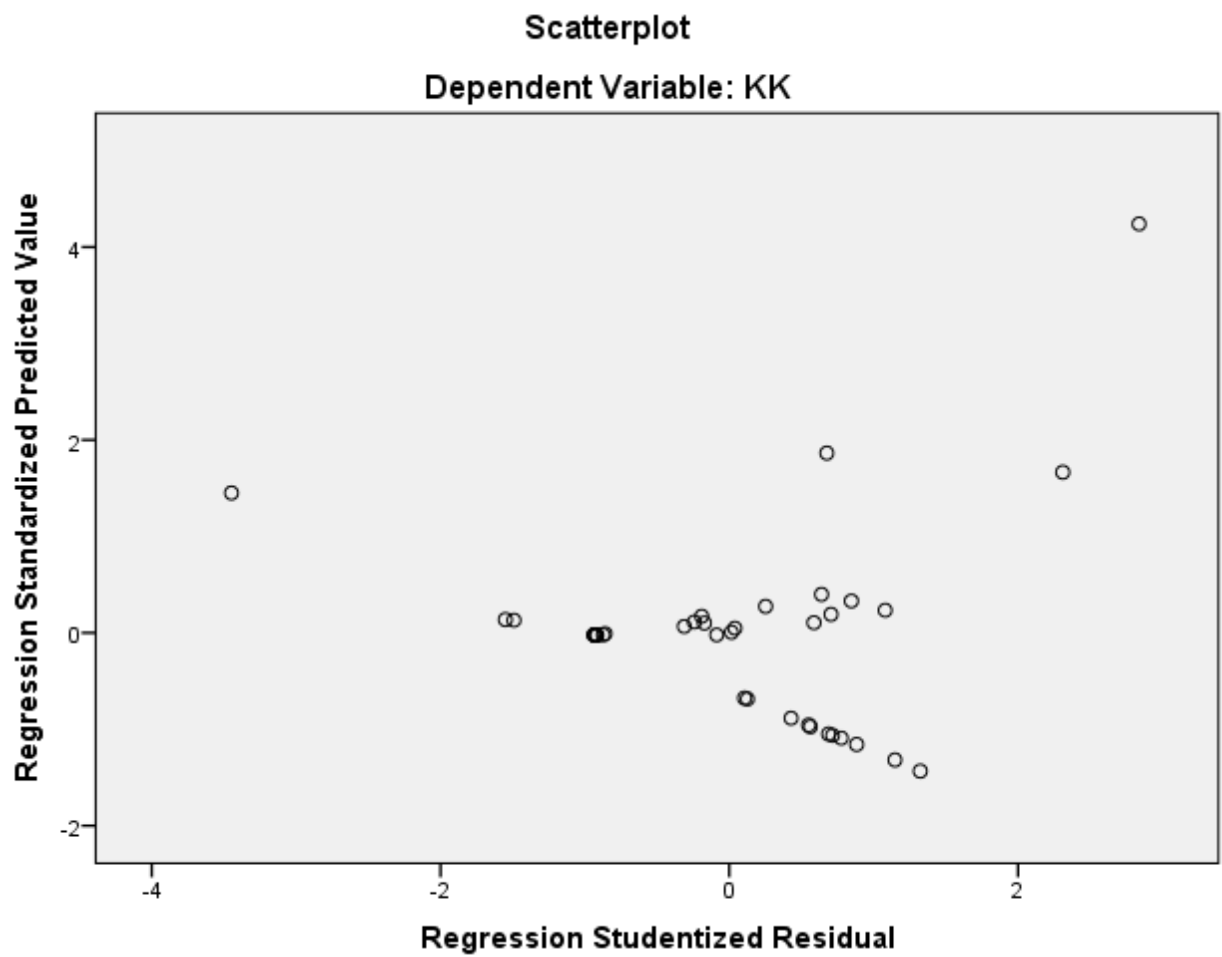
Dependent Variable: KK



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KK





Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.676	1.572		4.884	.000		
PAD	3.294E-13	.000	1.001	8.641	.000	.578	1.731
DP	-2.200E-13	.000	-.761	-6.634	.000	.590	1.694
BM	-8.764E-14	.000	-.124	-1.035	.308	.537	1.864

a. Dependent Variable: KK

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6143.455	3	2047.818	30.951	.000 ^b
	Residual	2381.850	36	66.163		
	Total	8525.306	39			

a. Dependent Variable: KK

b. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.849 ^a	.721	.697	8.13403	2.185

a. Predictors: (Constant), BM, DP, PAD

b. Dependent Variable: KK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Ririn Yuni Ariska
NPM : 1705170103
Tempat dan Tanggal Lahir : Tuban, 03 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke- : 1 dari 2 bersaudara
Alamat : Jl. Pipit III No.423 Prumnas Mandala Medan
No. Telepon : 088807622300/082164894652 (WA)
Email : ririnariska603@gmail.com

2. DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Sarjianto
Pekerjaan : Wiraswasta/Kuli Bangunan
Nama Ibu : Nunung Sri Wahyuni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pipit III No.423 Prumnas Mandala Medan

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Muhammdiyah 30 Medan
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 13 Medan
Sekolah Menengah Akhir : SMA Swasta Budistrya Medan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 1 November 2021



Ririn Yuni Ariska



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat lain agar di keabsahan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1386/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 01 Juni 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa

Nama : Ririn Yuni Ariska
N P M : 1705170103
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2019

Dosen Pembimbing : **Seprida Hanum Harahap, SE., SS., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 23 Juni 2022**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 12 Dzulqaidah 1442 H
23 Juni 2021 M



Tembusan :

1. Peninggal.



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mubtaz Rusli No. 3, Medan, Telp. 061-662 8547, Kode Pos 20138

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda 1997/JDL/SAR/AKT/FEB/UMSU/2/2/2021

Nama Mahasiswa	Ririn Yuni Ariska
NPM	1705170103
Program Studi	Akuntansi
Konsentrasi	Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul	2/2/2021
Nama Dosen pembimbing ^{*)}	Seprida Hanum Harahap, SE, SS, M.Si (6 Februari 2021)

Judul Disertasi^{**)}

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan dan Belanja Modal
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2019

Disahkan oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan,

Dosen Pembimbing

Seprida Hanum Harahap, SE, SS, M.S

Keterangan:

*) Dosen ahli Program Studi Studi

**) Dosen ahli Disertasi Penelitian

Revisi: Revisi yang dilakukan oleh Dosen pembimbing, sesuai dengan arahan dan petunjuk bimbingan dari Dosen Pembimbing



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, _____ H
20 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

Assalamu'alaikum

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : R I R I N Y U N I A R I S K A

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 1 0 3

Tempat Tgl Lahir : T U B A N 0 3 J U N I 1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L N . P I P I T III N O . 4 2 3
P R U M N A S M A N D A L A

Tempat Penelitian : B A D A N K E S A T U A N B A N G -
S A D A N P O L I T I K P R O V I
N S I S U M A T E R A U T A R A

Alamat Penelitian : J L . G A T O T S U B R O T O N O .
3 6 1 , L A L A N G , K E C . M E D A N
S U N G G A L 2 0 1 2 6 M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain

- 1 Transkrip nilai sementara
- 2 Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si)

Wassalam
Pemohon

Rly
(Ririn Yuni Ariska)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tenggelinya

Nomor : 1384/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 Medan, 12 Dzulqaidah 1442 H
Lampiran : 23 Juni 2021 M
Perihal : **Izin Riset**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara
Jln. Gatot Subroto No.361, Lalang, Kec. Medan Sunggal 20126 Medan
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ririn Yuni Ariska
Npm : 1705170103
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2019

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal


Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4557009 - 4524894
Fax (061) 4527480 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070-1769 /BK.B.P/VI/2021

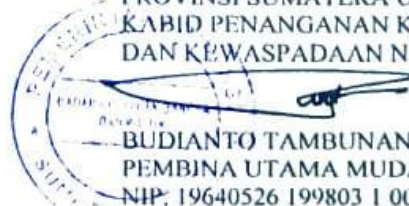
1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas,Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1384/11-3-AU/UMSU/05/F/2021 Tanggal 23 Juni 2021 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAIWA

- a. Nama : Ririn Yuni Ariska
b. Alamat : Medan
c. Pekerjaan : Mahasiswa
d. Nip/Nim/KTP : 1705170103
e. Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2019.
f. Lokasi/Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
g. Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
h. Peserta : Sendiri
i. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
a. Untuk pengawasan surat izin yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan, 28 Juni 2021

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI SUMATERA UTARA
KABID PENANGANAN KONFLIK
DAN KEWASPADAAN NASIONAL


BUDIANTO TAMBUNAN, SE, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19640526 199803 1 002

Tembusan

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Ka Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Gedung Bank Sumut Lantai 7

MEDAN

Medan, 20 Agustus 2021

Nomor : 071 / 2363 / SEK / 2021
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penelitian.

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

di -
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Nomor: 070-1769/BKB P/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, Perihal Rekomendasi Penelitian dan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1384/11.3-AU/UMSU/05/F/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Rekomendasi Penelitian atas nama :

Nama : Ririn Yuni Ariska
NIM : 1705170103
Jurusan : Akuntansi
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Mahasiswa diatas akan melaksanakan Penelitian, dari tanggal 23 Agustus s/d 23 November 2021 selanjutnya hasil penelitian tersebut dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SEKRETARIS,


Drs. HENDRA YUDI, M.Kes
PEMBINA TK. I
NIP. 19670818 199401 1 002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menyebarkan surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2305/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021 Medan, 17 Shafar 1443 H
Lamp. : - 24 September 2021 M
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
Jln. Imam Bonjol No.18 Gedung Bank Sumut Lt.7 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ririn Yuni Ariska
N P M : 1705170103
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Janur, SE., MM., M.Si

C.c.File



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Gedung Bank Sumut Lantai 7

MEDAN

Medan, 6 Oktober 2021

Nomor : 071/2031/Sekw
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Selesai Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Univ Muhammadiyah Sumatera Utara

di -
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 2305/II 3-AU/UMSU-05/F/2021 tanggal 24 September 2021, Perihal Menyelesaikan Riset atas nama :

Nama	Rinn Yuni Aniska
NIM	1705170103
Jurusan	Akuntansi
Judul	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan ini kami menyatakan bahwasanya Mahasiswa diatas telah melaksanakan Riset/Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Demikian kami sampaikan untuk urusan selanjutnya

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pl. SEKRETARIS,


H. HENRI AGUSLAN, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19690817-199003 1 005



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri Ba No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ririn Yuni Ariska
NPM : 1705170103
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Seprida Hanum Harahap, SE., SS., M.Si
Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2016-2019

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki latar belakang proposal perbaiki identifikasi, rumusan masalah	01/04/2021	Sh
Bab 2	perbaiki bab II tambahkan teori dan jurnal	19/04/2021	Sh
Bab 3	perbaiki defenisi operasional, Tentukan analisis data, waktu penelitian	30/04/2021	Sh
Daftar Pustaka	perbaiki daftar pustaka.	12/05/2021	Sh
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	lengkapi data instrumen penelitian	21/05/2021	Sh
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai bimbingan Ace	1/6/2021	Sh

Medan, 01 Juni 2021

Diketahui oleh
Ketua Program Studi


FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing


Seprida Hanum Harahap, SE., SS., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 28 Juli 2021* mencrangkan bahwa.

Nama : Ririn Yuni Ariska
NPM : 1705170103
Tempat / Tgl. Lahir : Tuban, 03 Juni 1999
Alamat Rumah : Jl. Pipit III No.423 Prumnas Mandala Medan
Judul Proposal : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Seprida Hanum Harahap, SE, SS, M. Gi*

Medan, 28 Juli 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M. Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M. Si

Pembimbing

Seprida Hanum Harahap, SE, SS, M. Si

Pembanding

Sukma Lesmana, SE, M. Si

Diketahui / Disetujui
a n Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Ade Guhawan, SE, M. Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 28 Juli 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ririn Yuni Ariska*
NPM. : 1705170103
Tempat / Tgl.Lahir : Tuban, 03 Juni 1999
Alamat Rumah : Jl. Pipit III No.423 Prumnas Mandala Medan
Judul Proposal : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2019

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	Tahun data tidak perlu di tulis pada judul
<i>Bab I</i>	<ul style="list-style-type: none">- data tentang Provinsi Sumatera Utara seharusnya data meliputi semua kabupaten/kota se Sumut secara rinci- kalogak sanggup meneliti semua kabupaten / kota cukup meneliti kabupaten / kota yang ada masalah penelitian saja- belum ada masalah penelitian karena tidak ada fenomena/gap praktik dengan teori-teori ttg variabel penelitian-identifikasi masalah tidak relevan denga latar belakang masalah seharusnya identifikasi menggambarkan rangkuman dari latar belakang maalah
<i>Bab II</i>	<ul style="list-style-type: none">- teori peacock and wiseman itu mana referensinya kok dangkal kali teorinya (harus rinci dan jelas didukung dari penelitian terdahulu)- Pertama yg dibahas dalam landasan teori adalah teori-teori tentang variabel dependen- sub judul penelitian terdahulu itu diawali narasi pengantar dulu baru tabel kalo cuma tabel aj isi ya aneh- kerangka konseptual dijelaskan dengan penguatan dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan bukan common sense- hipotesis penelitian tidak menggunakan nota H1,H2,H3 dll
<i>Bab III</i>	Pada teknik analsis data jelaskan menggunakan software statistik apa ? versi brp ?
<i>Lainnya</i>	- Minimum artikel 3 dosen akuntansi umsu termasuk milik pembimbing yg relevan dgn topik wajib dikutip dalam proposal ini dan disajikan di daftar pustaka

	- Semua referensi yg dikutip wajib disajikan di daftar pustaka	
Kesimpulan	Perbaikan Minor	Seminar Ulang
	Perbaikan Mayor	

Medan, 28 Juli 2021

TIM SEMINAR

Ketua



Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris



Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing



Seprida Hanum Harahap, SE, SS, M.Si

Pembanding



Sukma Lesmana, SE., M.Si